

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
(1 NOVEMBER 2022 s.d. 9 JANUARI 2023)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):

1. Rapat Kerja

a. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI, mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), tanggal 22 November 2022 dengan acara Penjelasan DPR RI (Komisi IV), Pandangan Pemerintah, Pandangan Dewan Perwakilan Daerah, Penyerahan DIM RUU tentang KSDAHE, Pengesahan Jadwal Acara Pembahasan RUU tentang KSDAHE, dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang KSDAHE, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima Pandangan Pemerintah dan Pandangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui Rancangan Jadwal acara Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui Mekanisme atau Tata Cara Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI, mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), tanggal 5 Desember 2022, dengan acara Pembahasan DIM RUU tentang KSDAHE dan Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selambat-lambatnya minggu kedua Januari Tahun 2023.

- 2) Komisi IV DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Kunjungan Kerja

a. Provinsi D. I. Yogyakarta

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 8 s.d. 10 Desember 2022, dalam rangka melakukan jaring pendapat pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan para pakar/akademisi di Universitas Gadjah Mada, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Ir. Djoko Marsono (Guru Besar Bidang Ekologi Hutan).
- 2) Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. (Guru Besar Manajemen Hutan).
- 3) Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D. (Dekan Fakultas Kehutanan).
- 4) Dr.rer.nat. Sena Adi Subrata, S.Hut., M.Sc. (Pakar Konservasi Sumber Daya Hutan).
- 5) Dr.rer.silv. Muhammad Ali Imron S.Hut., M.Sc. (Pakar Biologi Konservasi).
- 6) Dr. Hero Marhaento, S.Hut., M.Si. (Pakar Pengelolaan Kawasan Konservasi).
- 7) Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana).
- 8) Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si. (Pakar Hukum Lingkungan).

b. Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 8 s.d. 10 Desember 2022, dalam rangka jaring pendapat pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan para pakar/akademisi di Universitas Brawijaya Malang, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si. (Guru Besar Bidang Imunologi dan Kesehatan Ikan Universitas Brawijaya)
2. Prof. Ir. Didik Suprayoga, M.Sc., Ph.D. (Guru Besar bidang Ilmu Konservasi Tanah dan Air);
3. Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc. (Dosen bidang Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan);
4. Ir. Sukandar, M.P. (Dosen bidang Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan);
5. Dr. Dra. Endang Arisoesilaningsih (Dosen Bidang Konservasi Sumber Daya Hayati);
6. Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. (Dosen Ilmu Hukum);
7. Citra Satrya Utama Dewi, S.Pi., M.Si. (Universitas Brawijaya); dan
8. Prof. Dr. Rachmad Safa'at Sh., M.Si. (Universitas Brawijaya).

c. Provinsi Lampung

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 8 s.d. 10 Desember 2022, dalam rangka jaring pendapat pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan para pakar/akademisi di Universitas Lampung, yaitu:

No.	Nama	Pakar Keahlian
1	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.	Hukum
2	Dr. Indra Gumay Febryano, M.Si.	Kehutanan
3	Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.	Pertanian
4	Dr. Indra Gumay Yudha, M.Si.	Perikanan
5	Dr. Hengky Mayaguezz	Kelautan
6	Dr. Teguh Endaryanto	Pemberdayaan
7	Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.	Ekologi
8	Dian Iswandar, S. Hut., M.Sc.	Konservasi

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Tidak ada kegiatan

1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2022)

a. **Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

Kegiatan Panja:

1) **RDP** dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 12 Desember 2022, membahas Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penegakan Hukum atas tindak kejahatan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelaksanaan pemberian izin lingkungan untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, serta kegiatan pertambangan dan migas berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pengawasan atas kewajiban pemegang izin lingkungan, memutuskan:

1. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara serius melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada kasus pertambangan ilegal serta menindak tegas seluruh kegiatan pertambangan ilegal di dalam dan di luar kawasan hutan.

Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan kasus dan penanganan praktik pertambangan ilegal yang saat ini semakin masif terjadi.

2. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Persetujuan Lingkungan, dalam rangka memenuhi tata waktu proses penilaian AMDAL dan pemberian Persetujuan Lingkungan sebagaimana amanat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu dilakukannya evaluasi dimaksud, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Pemerintah untuk meminimalisir ketidakpercayaan para pelaku usaha terhadap Pemerintah.
3. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi kegiatan berusaha yang memiliki kewajiban menyusun Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL) dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan.
4. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan tindakan tegas mulai dari penerapan sanksi administratif termasuk Audit Lingkungan sampai dengan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha terhadap Pemegang Persetujuan Lingkungan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban Perusahaan Pemegang Persetujuan Lingkungan dalam bentuk matriks, dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat Panja hari ini.
5. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan Data Perusahaan Industri Wajib Sistem Pemantauan dalam Jaringan (SPARING) sesuai Pasal 2 Ayat (2) dan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.93/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Data dimaksud agar disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat Panja hari ini.

Maksud dan Tujuan Pembentukan Panja:

Maksud dan tujuan dibentuknya Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah agar Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi dan melakukan kajian atas:

- a. Pengelolaan lingkungan hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Pelaksanaan pemberian Izin Lingkungan serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, dan kegiatan berdampak lingkungan hidup lainnya;
- c. Pengawasan aktivitas pertambangan dan industri agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat praktek usaha yang dilakukan.
- d. Kasus-kasus perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, dan kegiatan usaha berdampak lingkungan hidup lainnya;
- e. Upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, dan kegiatan usaha berdampak lingkungan hidup lainnya; serta
- f. Upaya penegakan hukum atas kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas bisnis, aktivitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh operasional fasilitas pelayanan kesehatan, operasional industri, serta kegiatan usaha berdampak lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan informasi dan keterangan yang didapat, diharapkan Komisi IV DPR RI dapat memberikan rekomendasi atas alternatif penyelesaian permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama untuk tindakan pencegahan, penanggulangan, penindakan, serta pemulihan lingkungan.

Keputusan:

- a) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Panja) sepakat telah melaksanakan seluruh tahapan yang harus dilaksanakan selama tahun 2022, sebagaimana Kerangka Acuan Panja.

- b) Beberapa butir **Rekomendasi** Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, **sambil menunggu bahan-bahan** yang akan disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana RDP Panja yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022, adalah sebagai berikut:
- 1) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara serius melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada kasus pertambangan ilegal serta menindak tegas seluruh kegiatan pertambangan ilegal di dalam dan di dalam kawasan hutan. Selanjutnya Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan kasus dan penanganan praktik pertambangan ilegal yang saat ini semakin masif terjadi.
 - 2) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan tindakan tegas mulai dari penerapan sanksi administrasi termasuk Audit Lingkungan sampai dengan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha terhadap Pemegang Persetujuan Lingkungan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Persetujuan Lingkungan, dalam rangka memenuhi tata waktu proses penilaian AMDAL dan pemberian Persetujuan Lingkungan sebagaimana amanat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu dilakukannya evaluasi dimaksud, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Pemerintah untuk meminimalisir ketidakpercayaan para pelaku usaha terhadap Pemerintah.
 - 4) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi kegiatan berusaha yang memiliki kewajiban menyusun Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Lingkungan (UKL/UPL dan AMDAL) dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan.
 - 5) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mendorong Pemerintah c.q. Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan, maupun tugas pemulihan lingkungan.

- 6) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyepakati perlu adanya edukasi serta penyadartahuan terkait pengelolaan sampah dimulai dari level rumah tangga melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis bersama kementerian dan lembaga terkait.
 - 7) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlunya dorongan kepada Pemerintah untuk lebih fokus melaksanakan program dalam rangka mengkonversi sampah domestik agar dapat bernilai ekonomi, agar semua pihak mau dan dapat berpartisipasi dalam pengurangan timbunan sampah domestik.
 - 8) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 membantu kewirausahaan sosial di bidang persampahan, baik dari segi kekeluwasaan berusaha (regulasi), pendanaan, bantuan sarana prasarana, pembinaan, peningkatan kapasitas serta membantu komunikasi dengan pihak pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota dalam hal kerja sama.
 - 9) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 membuat masterplan persampahan yang layak kredit (Bankable), menegakkan peraturan persampahan, dan membenahi sistem retribusi yang layak dan berkeadilan, serta membuat panduan yang jelas dari pemerintah pusat perihal peran swasta dalam kerjasama dengan pemerintah daerah.
 - 10) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat *masterplan* persampahan yang layak kredit (*bankable*), menegakkan peraturan persampahan, dan membenahi sistem retribusi yang layak dan berkeadilan, serta membuat panduan yang jelas dari Pemerintah Pusat perihal peran swasta dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- c) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memutuskan **untuk tidak memperpanjang masa tugas Panja** terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan,

untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diputuskan oleh Panja.

b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

1) Maksud dan Tujuan Pembentukan Panja:

Panja dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Mengawal dan mendorong percepatan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat yang berada pada kawasan budi daya/di luar kawasan hutan, dalam rangka meningkatkan produksi kelapa sawit untuk mendukung ekspor;
- b) Mengawal kebijakan dan regulasi terkait penyaluran dana perkebunan kelapa sawit serta kebijakan penyaluran pendanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR);
- c) Menggali lebih dalam guna mendapatkan informasi dan gambaran terkait kebijakan pengembangan kelapa sawit dan peremajaan kelapa sawit serta kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana perkebunan kepada pekebun/perkebunan kelapa sawit rakyat; dan
- d) Merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah terkait kebijakan pengembangan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat.

2) Rekomendasi Panja:

Hingga saat ini, masih terdapat beberapa data dan informasi serta fakta-fakta lapangan yang belum diperoleh dan harus digali lebih dalam. Selain itu, perkebunan sawit di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan sawit rakyat yang melibatkan tenaga kerja yang besar, sehingga sangat penting untuk memberikan arah yang jelas kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan tata kelola sawit rakyat maupun melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan kebijakannya.

Selain itu, Pengawasan pelaksanaan Permentan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peremajaan Sawit Rakyat menjadi sangat penting dan mendapatkan perhatian dari Komisi IV DPR RI, terutama ketika regulasi tersebut tidak memberikan kemudahan dalam peremajaan sawit rakyat serta tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekebun sawit rakyat.

Dengan kondisi itu, maka Komisi IV DPR RI **merekomendasikan agar Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat diteruskan/dilanjutkan pada tahun 2023 yang akan datang.**

c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022):

1) Maksud dan Tujuan Pembentukan Panja:

Maksud dan tujuan Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan adalah untuk mendapatkan informasi atas pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksana di bawahnya, terkait beberapa hal sebagai berikut:

- a) permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan serta konflik tenurial akibat tumpang tindih perizinan dalam kawasan.
- b) pelaksanaan persetujuan permohonan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, termasuk tukar-menukar kawasan hutan dan rencana pengelolaan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Pulau Jawa.
- c) penyelesaian kasus perambahan kawasan hutan yang sudah mendapatkan putusan inkrah; dan
- d) penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas kasus perusakan kawasan hutan serta kegiatan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin).

Berdasarkan atas informasi dan keterangan yang didapat, diharapkan Komisi IV DPR RI dapat memberikan rekomendasi atas alternatif penyelesaian permasalahan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan di Indonesia.

2) Keputusan:

- a) Panja Komisi IV DPR RI tentang Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan sepakat masih perlu menambahkan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Panitia Kerja, seperti **memanggil perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melakukan kegiatan illegal di dalam kawasan hutan** serta **melaksanakan RDP dengan Eselon I Kementerian Kehutanan terkait permasalahan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan**.
- b) Beberapa butir **Rekomendasi** Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:
 - Komisi IV DPR RI perlu memanggil perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melakukan kegiatan illegal di dalam kawasan hutan.
 - Komisi IV DPR RI perlu melaksanakan RDP dengan Eselon I Kementerian Kehutanan terkait permasalahan penggunaan

kawasan hutan, termasuk di antaranya pengaturan kuota dalam rangka pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

- Komisi IV DPR RI perlu meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pemetaan lokasi-lokasi penambangan nonprosedural dan kegiatan nonprosedural lainnya dalam kawasan hutan.
- c) Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan **memutuskan untuk memperpanjang masa tugas** Panitia Kerja terkait permasalahan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan.

d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan (dibentuk pada masa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022)

3) Maksud dan Tujuan Pembentukan Panja:

- a) Panja dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI di dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d bahwa tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
- b) Fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi serta untuk mengawal kebijakan Pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c) Terpenuhinya prasyarat minimum untuk fasilitas sarana prasarana dan permasalahan nelayan, diharapkan akan memberikan dampak, baik terhadap pelayanan bagi pelaku usaha perikanan, terutama nelayan serta masyarakat yang berkepentingan.

4) Rekomendasi Panja:

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membenahi dan melakukan perbaikan serta menindaklanjuti, antara lain:

- a) Menambah anggaran program dan kegiatan agar dapat optimal dan terasa dampaknya kepada masyarakat terutama nelayan kecil.
- b) Optimalisasi bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat, koperasi dan UMKM, serta memprioritaskan asuransi nelayan.
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membangun infrastruktur pendukung di sentra perikanan.
- d) Menambah infrastruktur kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang dapat menjangkau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sehingga mampu mencegah dan memberantas pelaku *IUU Fishing* di perairan Indonesia.

- e) Optimalisasi Pokmaswas sebagai Nelayan Bela Negara terutama di wilayah-wilayah rawan invasi kapal ikan asing, seperti di WPP 711 (Laut Natuna Utara), WPP 571 (Selat Malaka), WPP 718 (Perbatasan dengan Australia), WPP 716 (Perbatasan dengan Filipina), WPP 573 (Perbatasan dengan Timor Leste), dan semua WPP yang berbatasan dengan daerah-daerah terluar.
- f) Pengawasan kepatuhan Kapal Ikan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022, mengingat mempunyai korelasi positif dengan peningkatan PNBP dan pajak, serta daya dukung ekosistem sumber daya kelautan perikanan (*sustainable capture fisheries*).
- g) Meng-upgrade teknologi di Balai Riset dan Observasi Laut Bali, seperti pendeteksi *fish stock*, mangrove, terumbu karang, tambak budi daya, oseanografi, *illegal fishing*, destruktif *fishing*, dan lain-lain.
- h) Perizinan disederhanakan, asuransi nelayan kecil dimunculkan kembali, serta mendorong Pemerintah untuk melakukan audit kelangkaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
- i) Memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana prasarana perikanan Balai Budidaya Laut Ambon, seperti *hatchery* dan peningkatan teknologi produksi benih.
- j) Membuat kebijakan Lumbung Ikan Nasional untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara dan 6 provinsi lainnya, serta memperjelas masterplan LIN.
- k) WPP 714 dijadikan daerah *spawning ground* untuk kepentingan ekologi dan konservasi sumber daya perikanan dengan melibatkan masyarakat.
- l) Mengalokasikan kuota penerimaan PPPK dan CPNS sebagai penyuluh Perikanan mengingat jumlahnya masih sangat minim.
- m) Peningkatan keterampilan dasar melalui pelatihan bagi pelaku utama, termasuk ketrampilan *basic safety training* untuk nelayan.
- n) Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan Komisi IV DPR RI memutuskan **Panja ini tidak dilanjutkan.**
- o) Selanjutnya Komisi IV DPR RI memandang perlu untuk Masa Sidang yang akan datang **dibentuk Panja Penangkapan Ikan Terukur (PIT).**

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Sumatera Selatan

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 16 s.d. 20 Desember 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Bidang Pertanian

a) Desa Serasi, Desa Telang Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyu Asin

- Desa Serasi (Selamatkan Lahan Rawa untuk Kesejahteraan Petani) merupakan kegiatan perluasan areal tanam yang direncanakan pada tahun 2018 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Pada awalnya kegiatan ini akan dibuka lahan rawa untuk kegiatan budi daya pertanian seluas 200 ribu hektar, dengan melakukan pembangunan jaringan irigasi, perعتakan sawah baru, dan pembangunan jalan usaha tani. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40.1/Permentan/RC.010/10/2018 dan Kementan Nomor 59 /Kpts/OT.050/M/1/2019
- Tujuan kegiatan adalah untuk: (1) meningkatkan Indeks Pertanaman dan atau/meningkatkan produktivitas, (2) Meningkatkan Partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan Rawa.
- Realisasi program SERASI untuk Sumatera Selatan seluas 159.231 hektar. Berdasarkan laporan petani, telah terbangun luas areal lahan rawa seluas 896 hektar yang dikelola oleh 586 petani yang tergabung dalam 18 kelompok tani. Dilaporkan bahwa saat ini telah dibentuk korporasi Petani dengan nama PT TAM yang mengelola lahan sawah rawa seluas 532 hektar.
- Pada saat ini rerata produktivitas tanaman padinya adalah 7 s.d. 10 ton KKP per hektar. Dalam satu tahun petani dapat melakukan budi daya padi 2 kali (IP 200).

Masalah yang dihadapi oleh petani adalah:

- Pupuk subsidi sulit diperoleh dan harga pupuk non subsidi sangat mahal, harga pupuk non subsidi untuk urea adalah Rp 500.000 untuk 50 kg.
- Terjadi pendangkalan pada saluran irigasi terutama pada pintu pemasukan dan pengeluaran air.
- Sulit untuk mendapatkan BBM untuk kegiatan budidaya (BBM untuk Alat Mesin Pertanian). Pembelian bbm melalui jerigen untuk alsintan tidak di layani oleh SPBU tidak dilayani, sehingga perlu diberikan alokasi khusus untuk BBM bersubsidi untuk Pertanian
- Petani membutuhkan excavator untuk melakukan normalisasi saluran irigasi, berdasarkan penjelasan Wakil Bupati,

Kabupaten Banyuasin memerlukan 300 unit excavator untuk mengolah seluruh lahan pertaniannya.

- Perlu tambahan mesin combine harvester untuk menyikapi sulitnya tenaga kerja untuk panen dan efisiensi panen.
- Petani lebih memilih subsidi produksi dibandingkan dengan subsidi pupuk, harga pupuk tidak terlalu bermasalah jika pemerintah dapat menjamin kepastian harga di tingkat petani pada saat panen.
- Membentuk BUMD yang dapat membeli hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan pada saat panen.

b) Gudang Bulog Karya Baru, Kelurahan Karya Baru, Kota Palembang

- Secara nasional stok beras yang dikuasi adalah 448.261 ribu ton, yang terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 239.340 ton dan beras komersil 208.921 ton.
- Dalam 1 bulan dibutuhkan 300 ribu ton untuk mengisi pasar dan stabilisasi harga beras di pasar.
- Realisasi pengadaan beras pada kantor wilayah kerja Bulog Se-Sumatera Selatan hanya sebesar 21.814 ton dari target sebesar 94.000 ton atau hanya sebesar 23.21 persen dari targetnya. Seretnya pengadaan beras disebabkan harga beras di tingkat petani atau penggilingan sudah di atas HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebesar Rp8.200,00/kg. Saat Bulog akan melakukan pengadaan beras dari sumber dalam negeri dengan harga pembelian komersil sebesar Rp10.200,00, harga beras di tingkat petani atau di penggilingan telah mencapai harga Rp11.700,00/kg.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kampung Pro Iklim Kelurahan Talang Jambe

- a) Kampung Pro Iklim terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian KLHK dengan tujuan untuk mengurangi emisi dan pengurangan gas karbon melalui upaya pemberdayaan masyarakat di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan melalui penanaman berbagai macam tanaman pekarangan produktif, seperti tanaman palawija dan sayuran, tanaman buah-buahan, bahkan tanaman hutan, budi daya peternakan dan perikanan, serta melakukan pemanfaatan limbah rumah tangga untuk pembuatan kompos. Konsep *green and clean* menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

- b) Pada awalnya kegiatan Kampung Pro Iklim adalah kegiatan dari PKK yang dikembangkan dengan kegiatan kegiatan mitigasi dan adaptasi pada tingkat keluarga di pekarangan rumahnya.
- c) Kegiatan ini selain telah membuat kualitas lingkungan mikro menjadi lebih asri dan lebih sejuk, juga menghasilkan tambahan penghasilan bagi rumah tangga melalui budi daya pertanian di pekarangan dan pembuatan kerajinan yang berasal dari limbah atau barang yang tidak dimanfaatkan.
- d) Kampung Proklim di Kelurahan Talang Jambe telah mendapatkan penghargaan Proklim Utama dan pendampingan usaha dari Pertamina, sebagai kampung yang berhasil memperbaiki kondisi lingkungan mikronya atas dasar pemberdayaan dan keterlibatan seluruh penduduknya.

Bidang Kelautan dan Perikanan

Balai Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu (BKIPM) Palembang

- a) Tugas utama dari unit kerja ini adalah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ikan melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran karantina ikan dan sekaligus memberikan pelayanan pengawasan terhadap mutu ikan yang di lalu lintaskan, baik antarprovinsi maupun antarnegara. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka BKIPM Palembang telah memiliki sertifikasi ISO 9001 2015 untuk pelayanan umum dan sertifikasi ISO 17025 untuk kualitas mutu laboratorium.
- b) **Masalah utama yang dihadapi oleh BKIPM Palembang adalah:**
 - Anggaran yang dikelola tidak sebanding dengan wilayah kerja dan luas wilayah yang harus diawasinya.
 - Saat ini Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Palembang masih Eselon 4 sehingga ada gap dalam proses komunikasi dan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang lain.
 - Anggaran untuk kegiatan operasional laboratorium dalam melakukan pengawasan mutu produk ikan sangat minim, terlebih bahan-bahan laboratorium harganya relatif mahal.
 - Lahan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini belum termanfaatkan karena belum tersedianya dana untuk pembangunan.

2) Provinsi Bali

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 16 s.d. 20 Desember 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Fluktuasi Harga Pangan di Pasar Kota Denpasar

Harga Bahan Pangan saat Sidak di Pasar Badung dan Pasar Kumba Sari Provinsi Bali

Jenis Bahan Pangan	Harga di Pasar
Beras (5 kg)	Rp42.000,00
Beras Bulog Medium (per kg)	Rp8.400,00
Beras (kg)	Rp9.450,00
Cabe Merah Besar (kg)	Rp30.000,00
Cabe Rawit Merah (kg)	Rp30.000,00
Cabe Rawit Hijau (kg)	Rp35.000,00
Kentang (kg)	Rp14.000,00
Bawang Merah (kg)	Rp28.000,00
Bawang Putih (kg)	Rp22.000,00
Kemiri (kg)	Rp45.000,00
Tomat (kg)	Rp12.000,00
Jahe Lokal (kg)	Rp15.000,00
Kunyit (kg)	Rp10.000,00
Gula Merah (kg)	Rp20.000,00 s.d. Rp25.000,00
Kencur (kg)	Rp30.000,00
Laos (kg)	Rp10.000,00
Ayam Potong (kg)	Rp34.000,00
Telur (kg)	Rp35.000,00
Daging Sapi Lokal (kg)	Rp110.000,00

Operasi Pasar oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma di Pasar Badung, Kota Denpasar

Jenis Bahan Pangan	Harga di Pasar
Bawang Merah (per kg)	Rp21.000,00
Bawang Putih (per kg)	Rp18.000,00
Cabe Rawit Merah (per kg)	Rp21.000,00
Cabe Merah Besar (per kg)	Rp15.000,00
Tomat (per kg)	Rp8.000,00
Telur (per kg)	Rp41.000,00
Daging Ayam (per kg)	Rp30.000,00
Daging Sapi (per kg)	Rp119.000,00
Udang (per kg)	Rp59.000,00
Ikan Kembung (per kg)	Rp39.000,00
Tempe	Rp10.000,00
Tahu	Rp10.000,00
Beras Pertiwi (5 kg)	Rp54.000,00
Beras Pertiwi (10 kg)	Rp106.000,00
Beras Pertiwi (25 kg)	Rp256.000,00
Beras Putri (5 kg)	Rp57.000,00

Jenis Bahan Pangan	Harga di Pasar
Minyak Fitri (per liter)	Rp14.500,00
Gula (per kg)	Rp13.500,00
Tepung Terigu (per kg)	Rp13.000,00
Jeruk (per kg)	Rp13.000,00

b) Pemakaman Trunyan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Trunyan, agar mempergunakan peralatan dan/atau perlengkapan yang berbahan baku alami (*eco-friendly*), seperti kayu, bambu dan lainnya, dalam pelaksanaan Upacara Adat serta kegiatan lainnya di Pemakaman Trunyan dan sekitarnya. Hal ini dalam rangka mendukung pengendalian kualitas lingkungan di Desa Trunyan, sebagaimana kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur.

c) Budi Daya Ikan Sistem Keramba Jaring Apung di Danau Batur

- Wakil Pemuda daya Ikan Sistem Keramba Jaring Apung di sekitar Danau Batur menyampaikan akan menerima seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun dengan catatan Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat di sekitar Danau Batur.
- Diperlukan alternatif usaha budi daya ikan di sekitar Danau Batur dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan ikan air tawar, terutama untuk mendukung wisata kuliner di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Bangli.
- Diperlukan upaya sosialisasi dan penyadartahuan masyarakat dalam pengelolaan Danau Batur, khususnya terkait budi daya perikanan air tawar, agar tetap memegang prinsip kelestarian dan keberkelanjutan untuk kepentingan ekonomi dan hajat hidup orang banyak.

d) Upaya Penyelamatan Danau Batur

Permasalahan lingkungan hidup di Danau Batur, antara lain disebabkan oleh:

- Budi daya Ikan Sistem Keramba Jaring Apung melebihi batas maksimal, sementara sisa pakan dan kotoran ikan budi daya ikan sistem KJA menyebabkan penurunan kualitas air Danau Batur.
- Residu pupuk anorganik dan pestisida dalam budi daya pertanian yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

- Tanah di daerah tangkapan air Danau Batur merupakan jenis yang peka erosi.
- Sedimentasi dan elevasi muka air tanah danau yang diakibatkan oleh tingginya rata-rata curah hujan di Danau Batur.
- Budi daya pertanian yang dilaksanakan tanpa prinsip konservasi tanah dan air (memotong kontur), yang menyebabkan sedimentasi, pendangkalan danau, banjir, dan longsor.
- Pencemaran lingkungan yang menyebabkan turunnya kualitas air.

e) Pengembangan Budi Daya Jeruk Khas Kintamani

Permasalahan dan informasi terkait pengembangan jeruk Kintamani:

- Beberapa pohon Jeruk Siam Kintamani berusia tua dan membutuhkan peremajaan. Berdasarkan informasi terdapat 600 ha dalam 1 desa yang ditanami jeruk siam (1 Kecamatan Bangli terdapat 6500 ha).
- Jeruk Siam Kintamani rawan terhadap lalat buah.
- Panen raya jeruk siam dilakukan pada bulan Agustus-September.
- Harga jeruk siam saat panen raya sekitar Rp7.000,00-Rp8.000,00/kg.
- Tahun 2022, petani mengalami berbagai perubahan kebijakan dan kondisi salah satunya adalah penghapusan/dicabutnya pupuk subsidi untuk komoditas jeruk yang berdampak pada tinggi biaya perawatan jeruk (obat-obatan dsb.). Oleh karena itu, mengharapkan agar memberikan solusi kepada petani Kintamani agar mendapatkan pupuk murah.
- Petani Kintamani mengusulkan untuk mendapatkan bantuan permodalan. Dalam mengajukan bantuan tersebut, petani Kintamani sudah membuat badan hukum (Gapoktan) yang dapat digunakan untuk mendapatkan permodalan.
- Sumber Daya Manusia di Kintamani sangat kritis.
- Petani masih melakukan tumpangsari dengan sayur mayur dan lain-lain, tetapi kondisi lahan masih minim pengolahan. Oleh karena itu, membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti traktor besar, cultivator mini, jalan usaha tani (JUT), dan lain-lain. JUT masih belum memadai dan sangat penting. JUT sepanjang 25 km dan baru diperbaiki sepanjang 20 km. Oleh karena itu, meminta dukungan Komisi IV DPR RI

untuk perbaikan JUT di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani.

- Permodalan di Gapoktan terjadi permasalahan. Petani mengusulkan penambahan modal sehingga dapat mengambil obat dengan harga yang lebih murah.

3) Provinsi Sulawesi Selatan

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 16 s.d. 20 Desember 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar

- SMK Kehutanan Negeri Makassar dahulu bernama Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) dibuka (kembali) pada tanggal 20 Juni 2008, kerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Wilayah layanan SMK Kehutanan Negeri Makassar meliputi 9 (sembilan) provinsi yang berada di kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu Provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- SMK Kehutanan Negeri Makassar, setiap tahunnya menerima 102 siswa. Saat ini memiliki dua jalur penerimaan peserta didik, yaitu jalur reguler dan jalur khusus. Jalur khusus merupakan siswa yang berasal dari kawasan hutan, merupakan 50 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik.
- SMK Kehutanan Negeri Makassar telah menjalin kerja sama dengan 14 Taman Nasional, dan 8 Balai Konservasi SDAE, di wilayah layanan.
- Proses kegiatan belajar mengajar bersifat boarding school (sekolah asrama) dimana selama pendidikan, peserta didik wajib tinggal di asrama.
- Terdapat tiga kompetensi keahlian pada kurikulum 2013, yaitu Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSDH), dan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), sedangkan untuk kurikulum merdeka hanya terdapat Program Keahlian Kehutanan. Selama proses pendidikan seluruh siswa mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 7 (tujuh) bulan
- Output, serapan, dan sebaran alumni SMK Kehutanan Negeri Makassar di dunia kerja dan industri serta usaha sejak dari angkatan pertama sampai dengan angkatan ke 12 (dua belas),

61% diantaranya telah bekerja, baik sebagai ASN maupun non-ASN, 22% melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik diploma maupun strata satu di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, 3% diantaranya sebagai tenaga magang pada instansi pemerintah, sisanya 14% belum bekerja.

Harapan:

- Memfasilitasi program keahlian baru yaitu Lingkungan Hidup;
- Memfasilitasi program *link and match* untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui program Pertukaran Guru/Magang Guru bekerja sama dengan perusahaan dan industri terkemuka pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia juga sekolah unggulan Luar Negeri (LN);
- Memfasilitasi upaya sinergitas penempatan alumni dengan regulasi bagi perusahaan yang bergerak di kehutanan dan lingkungan hidup, termasuk dengan Menpan-RB meningkatkan formasi ASN bidang kehutanan dan lingkungan hidup, khususnya dari lulusan SMK Kehutanan Negeri, termasuk juga Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota;
- Peningkatan anggaran khususnya untuk mendukung program jalur KH, mulai dari bantuan transpor, matrikulasi, dan penambahan pamong siswa atau pembina harian siswa;
- Peningkatan fasilitas sarana prasarana sekolah seperti gedung olahraga dan pengembangan *teaching factory*.

b) Pelabuhan Perikanan Maccini Baji, Desa Pundata Baji, Kec. Labbakang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep)

- Masalah pokok yang dihadapi dalam rangka mengakselerasi pembangunan sektor perikanan:
 - ✓ Perubahan status PPI Maccini Baji untuk kembali menjadi TPI, dengan pertimbangan pendaratan ikan pada PPI tersebut lebih sedikit, karena nelayan lebih cenderung membawa hasil tangkapannya ke Makassar, sebab jarak tempuh lebih dekat dan sekaligus nelayan dapat berbelanja kebutuhan pokok dan perlengkapan melaut yang lebih lengkap.
 - ✓ Para pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudi daya ikan, maupun pengolah masih sulit mendapatkan BBM jenis solar dan pertalite, khususnya di wilayah kepulauan.
 - ✓ Akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan juga menjadi masalah pokok karena sulitnya jasa perbankan dan LPMUKP (Lembaga Pembiayaan Mikro Usaha Kelautan Perikanan) untuk mengakses wilayah kepulauan.

- ✓ Tidak tersedianya pupuk subsidi anorganik dan organik sektor perikanan.
 - ✓ Pendangkalan saluran tambak.
 - ✓ Kondisi tanah dasar tambak berlumpur karena adanya tumpukan residu pestisida dan zat kimia lainnya.
 - ✓ Terputusnya jaminan perlindungan nelayan dan pembudi daya dalam bentuk asuransi.
 - ✓ Tidak tersedianya sarana rantai pendingin pascapanen di wilayah kepulauan.
 - ✓ Masih kurangnya sarana penangkapan ikan bagi nelayan kecil.
 - ✓ Masih banyaknya area tambak potensi penggaraman yang belum terakomodir dalam program PUGaR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat).
 - ✓ Pengolahan hasil perikanan belum sesuai dengan SOP.
 - ✓ Masih minimnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.
 - ✓ Belum tersedianya sarana dan prasarana sentra kuliner.
 - ✓ Tenaga penyuluh yang ada belum sebanding dengan luasan wilayah potensi perikanan.
- Aspirasi Pemerintah Kabupaten Pangkep:
 - ✓ Meminta persetujuan pengalihan perubahan status PPI Maccini Baji menjadi TPI Maccini Baji.
 - ✓ Meminta penambahan pendingin pabrik es tenaga surya, SPBU, dan SPDN di wilayah Kecamatan Kepulauan.
 - ✓ Meminta penambahan petugas pendamping LPMLUKP khusus untuk empat wilayah Kecamatan Kepulauan.
 - ✓ Meminta adanya bantuan pupuk subsidi anorganik dan organik bagi pembudi daya ikan.
 - ✓ Meminta bantuan alat berat excavator dan *hand tractor* untuk mengatasi masalah pendangkalan dan pengolahan tanah yang sudah jenuh akibat penumpukan pupuk kimia.
 - ✓ Bantuan jaminan perlindungan nelayan dan pembudi daya dalam bentuk asuransi.
 - ✓ Bantuan alat tangkap bagi nelayan kecil.
 - ✓ Mengakomodir lahan-lahan tambak garam yang belum tersentuh oleh Program PUGaR dan berkelanjutan Program PUGaR.
 - ✓ Bantuan bedah UPI dan peningkatan SDM Pengolah dan Pemasar Hasil-hasil Perikanan.

- ✓ Bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil-hasil perikanan.
- ✓ Program tugas pembantuan sentra kuliner hasil-hasil perikanan.
- ✓ Penambahan tenaga penyuluh perikanan sesuai dengan potensi perikanan sebanyak 36 orang.

c) Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejadian Hilangnya 500 Ton Beras di Gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang

- Per tanggal 15 Desember 2022 total stok beras yang berada di Gudang Bulog sebanyak 427.614 ton dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Cadangan Beras Pemerintah sebesar 215.408 ton.
 - ✓ Beras komersil sebesar 212.207 ton.
- Perum Bulog menyampaikan bahwa pengadaan dilakukan guna menjaga stok CBP sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton. Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan Pemerintah. Realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan.
- Kendala pengadaan: pertama, permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas. Kedua, periode panen yang mundur dan tidak seragam antardaerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.
- Selain stok beras, terdapat stok komoditas lain seperti: stok tepung terigu sebesar 215 ton, daging kerbau sebesar 337 ton, daging sapi 7 ton, telur 46 ton, gula pasir 7.458 ton, minyak goreng 5.889 ton, bawang putih 22 ton, bawang merah 27 ton, dan kedelai 1.469 ton.
- Per tanggal 15 Desember 2022 realisasi pengadaan setara beras dalam negeri Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Selatan (Kanwil Bulog Sulsel) untuk tahun 2022 telah mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target pengadaan beras Kanwil Bulog Sulsel sebesar 264.300 dan telah terealisasi sebesar 276.926 ton. Selanjutnya untuk stok komoditas pangan lain terdapat stok gula pasir sebesar 345 ton, tepung terigu 4 ton, dan minyak goreng 959 kilo liter.

Tanggapan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan-Barat:

- Kasus pencurian beras sebanyak 500 ton di gudang Perum Bulog Kabupaten Pinrang terbongkar pada saat Perum Bulog melakukan opnam yang dilakukan sebulan sekali. Oknum

pelaku merupakan kepala gudang.

- Oknum pelaku pencurian beras telah dilakukan pemeriksaan, dikenai sanksi pemecatan oleh Perum Bulog dan dilanjutkan dengan audit investigasi.
- Pelaku telah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan telah ditahan. Pelaku dikenakan Undang-Undang Tipikor. Beras yang telah dicuri oleh pelaku telah dijual ke pihak lain.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Jawa Barat (Sukabumi)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 3 s.d. 5 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi

Terdapat beberapa komoditas unggulan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias yang dikembangkan oleh BBPBAT, diantaranya adalah ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan gurame, kodok lembu (ikan konsumsi), serta ikan koi, ikan koki (ikan hias).

Aspirasi Masyarakat:

Beberapa aspirasi dan masukan dari masyarakat diantaranya:

- Meminta perbaikan drainase yang sudah rusak agar aliran air menuju tambak mengalir lancar dan produksi budi daya masyarakat dapat meningkat.
- Meminta tambahan jumlah penyuluh agar permasalahan budi daya yang muncul di pembudi daya dapat segera dicarikan solusi.
- Meminta diadakannya program bimbingan teknis atau pelatihan mengenai pembuatan pakan serta penanganan pascapanen agar nilai tambah meningkat.
- Kelompok Mina Makmur sebagai Pokdakan yang mendapatkan stimulus bantuan calon induk ikan lele dari BBPBAT Sukabumi, meminta, selain bantuan calon induk ikan lele, kelompok menyampaikan agar pendampingan teknis selalu terus dilakukan, baik dari penyuluh maupun dari BBPBAT Sukabumi agar selalu dapat meningkatkan produksi benih bermutu dan keberlanjutan usaha kelompok.

b) Pelaksanaan Revitalisasi Danau Situgunung di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Manfaat Danau Situgunung:

- Sebagai pengairan persawahan, perikanan dan lainnya yakni Desa Sukamanis, Citamiang Kec. Kadudampit dan Desa Nagrak Utara, Kec Cisaat;

- Cadangan air;
- Pengendali banjir;
- Sarana irigasi;
- Rekreasi/ ODTWA;
- Habitat satwa dan tumbuhan.

Kondisi yang diharapkan:

- Normalisasi Danau Situgunung dalam rangka optimalisasi manfaat danau;
- Adanya pembagian peran para pemangku kepentingan (pemeliharaan danau serta pemantauan kondisi fisik danau); serta
- Adanya sinergi keberadaan pemegang izin serta kontribusi masing-masing pemangku kepentingan.

Hasil diskusi:

- Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango belum dapat melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam dan di sekitar kawasan, terutama di sekitar Danau Situgunung, mengingat tidak adanya dukungan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program dimaksud.
- Perlu dilakukan revitalisasi Danau Situgunung, berupa normalisasi dan pengerukan danau dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendangkalan dan sedimentasi danau yang terjadi.
- Diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi di antara seluruh instansi berwenang terkait dalam melaksanakan program Revitalisasi Danau Situgunung, terutama antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
- Diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan kepada pemegang perizinan berusaha di sekitar Danau Situgunung serta dorongan kepada pemangku kepentingan di sekitar Danau Situgunung dalam rangka melaksanakan program Revitalisasi Danau.
- Perlu diperoleh informasi mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan lahan yang dilaksanakan oleh para pemegang perizinan berusaha, baik berupa kewajiban maupun pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Perlu diperoleh informasi mengenai realisasi penebangan pohon untuk kegiatan penyiapan lahan (*land clearing*) dalam rangka Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Situ Gunung serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2) Provinsi Jawa Barat (Bandung)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 3 s.d. 5 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), Lembang:

- Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat mulai terdeteksi pada bulan Mei 2022 dan secara masif menyerang 50% peternak sapi perah di wilayah kerja Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Barat, dengan total yang terinfeksi sebesar 122.145 ekor. Disamping itu, terdapat 13.165 ekor yang dipotong paksa dan mati bangkar (depopulasi 12% dari total populasi) dan mengakibatkan peternak meninggalkan profesinya sebagai peternak sapi perah (semangat beternak berkurang).
- Berdasarkan data yang dilampirkan, per 18 Agustus 2022, ternak yang termasuk dalam KPSBU sebesar 10.497 ekor, yang terkena PMK dan mati sekitar 2.438 ekor. Disamping itu, akibat adanya PMK menyebabkan penurunan produksi susu. Berdasarkan catatan, bulan Mei 2022 produksi sebesar 108.313,5 kg/hari dan menurun di bulan Oktober 2022 menjadi sebesar 91.087 kg/hari.
- KPSBU telah melakukan upaya penanganan PMK yaitu dengan Biosecurity, pengobatan, pendampingan, penggunaan herbal, upaya pengetatan lalu lintas, pelarangan jual beli ternak sebelum adanya vaksinasi PMK, serta vaksinasi PMK dan pemasangan eartag baru sedang berlangsung.

Harapan/aspirasi KPSBU:

- Penggantian korban PMK Rp10.000.000/ekor mohon segera direalisasi;
- Jangan ada pembatasan periode penggantian korban PMK karena akan menjadi permasalahan baru;
- BIB Lembang menyediakan *straw sexing* untuk *recovery* populasi;
- Ada program *rearing* pedet yang dilakukan secara bersama-sama;
- Membangun Kawasan peternak sapi perah rakyat di lahan Pemerintah. KPSBU memiliki formula 100-100-1.000-10.000 yaitu 100 hektar lahan milik Pemerintah, 100 peternak sapi perah rakyat, 1.000 ekor ternak sapi perah, dan 10.000 liter produksi susu per hari. KPSBU tidak memiliki lahan dan mengusulkan kepada Pemerintah untuk membangun kawasan tersebut;

- Ada 204 peternak yang habis ternaknya dan meminta solusi kepada Komisi IV DPR RI untuk mengatasi permasalahan tersebut; serta
- KPSBU bisa bekerja sama dengan koperasi antar wilayah, misalnya Majalengka untuk melakukan pembinaan terkait manajemen koperasi peternak susu.

b) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kidang Jaya Desa Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

- LMDH Kidang Jaya mengapresiasi program Pemerintah melalui program perhutanan sosial di lahan Perum Perhutani dan kini sudah mulai dirasakan manfaatnya, program perhutanan sosial memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan pengembangan budi daya tanaman kopi. Kegiatan tersebut telah membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di sekitar hutan;
- LMDH Kidang Jaya mengapresiasi Pemerintah melalui pendampingan terhadap petani kopi khususnya, dengan adanya pendampingan bagi para petani, telah meningkatkan kapasitas dan kemampuan para petani, sehingga meningkatkan produksi kopi, di sisi lain hutan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik;
- Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh LMDH Kidang Jaya, masih tingginya biaya perawatan, biaya transportasi karena sebagian besar jalan tani masih tanah, tidak ada subsidi pupuk sehingga anggota kelompok beralih ke pupuk organik, dengan cara manual, untuk pengelolaan dan pengolahan yang modern membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pengolahan kopi.
- Kendala dan tantangan lain yang dihadapi oleh LMDH Kidang Jaya yaitu dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, mewajibkan usaha petani didorong untuk membentuk koperasi, untuk itu dibutuhkan pembinaan kelembagaan dari kementerian terkait.

3) Provinsi Banten (Serang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 3 s.d. 5 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten

Kegiatan yang dilaksanakan BPTP Banten pada tahun 2022 adalah:

- Pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis;
- Perbanyak benih sumber UPBS: 5000 kg (FS dan SS);

- Perbanyak benih sebar (untuk bantuan petani): 36.000 kg (ES);
- Perbanyak benih sebar Nutrizinc (kerja sama dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan): target 7100 kg;
- Pengembangan komoditas pangan lokal (talas beneng) untuk penyediaan benih dan bantuan untuk pengolahan tepung berstandar ekspor.

Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh BPTP, untuk kegiatan perbanyak perbenihan dilakukan kerja sama dengan petani penangkar benih yang berada di sekitar lokasi BPTP Banten.

Kendala lain yang dihadapi adalah kecilnya kapasitas lantai jemur yang dimiliki dengan kapasitas hanya 3 ton saja. Kegiatan perluasan, selain terkendala oleh anggaran juga terkendala dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh BPTP.

Pelayanan yang disediakan oleh BPTP adalah rakitan teknologi spesifik lokasi yang cocok dipergunakan di wilayah kerja BPTP Banten, antara lain teknologi budi daya dan penanganan panen serta pascapanen. Terjadinya perubahan SOTK di lingkungan Kementerian Pertanian, yang awalnya unit kerja BPTP berada di bawah Badan Litbang Pertanian, dengan struktur organisasi baru Kementerian Pertanian maka BPTP berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sampai saat ini belum diterbitkan nama satuan kerjanya. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan titipan dari Direktorat Jenderal Teknis di Kementrian Pertanian.

BPTP Banten juga menerima permohonan bantuan benih dari petani untuk tahun 2022 sebanyak 50.180 kg dan dari permohonan tersebut baru dapat didistribusikan benih sebar sebanyak 10.117 kg (masih terdapat kekurangan pemenuhan benih sumber dari petani ke BPTP Banten sebanyak 40.063 kg).

Untuk meningkatkan Kebutuhan optimalisasi fasilitas perbenihan BPTP Banten mohon:

- Renovasi/perluasan gudang benih;
- Dryer;
- Mesin pengemas dengan belt conveyor; dan
- Dehumidifier.

Permasalahan lainnya:

- Sebagai akibat dari transformasi kelembagaan, maka pada tahun anggaran 2023 BPTP Banten tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, termasuk untuk kegiatan pengadaan benih.
- Terdapat permintaan bantuan benih (benih sebar) dari petani

sebanyak 29.180 kg.

- Kapasitas gudang benih hanya 30.000 kg.
- Kapasitas lantai jemur 3000 kg.
- Permintaan bantuan benih talas beneng dari petani yang belum dapat dipenuhi.

b. Politeknik AUP Kelautan dan Perikanan Karangantu Serang

- Tugas dan fungsi Kampus Serang adalah melaksanakan pelatihan lapangan/praktek lapangan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat (SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2003).
- Program studi yang ada adalah: Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Mesin Perikanan, Teknologi Akuakultur/Budi Daya, Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, dan Penyuluhan Perikanan.

Aspirasi:

- Taruna dan Taruni berharap setelah lulus diberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan potensi di daerah asal guna meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga ke depan menjadi wiraswasta di bidang kelautan perikanan.
- Penyuluh Perikanan Bantu (PBB) ingin mendapatkan perhatian lebih dalam proses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ditambah alokasi penyuluhnya di daerah-daerah, minimal 1 kecamatan 1 penyuluh.

4) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 19 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Budi daya Kepiting dengan Sistem *Vertical Crab House* Surabaya:

- Pemilik usaha kepiting (*crab house aquatic*) adalah Bapak Tonny Bertholios S.Pi., yang telah berhasil membudidayakan kepiting dengan menerapkan *sistem vertical house*.
- Kepiting merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang menjanjikan, bahkan sangat sesuai untuk mendukung usaha ke luar negeri ataupun untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- Budi daya Kepiting dengan *sistem vertical crab house* merupakan sistem baru dalam budi daya kepiting yang dapat meminimalkan kematian, mengingat tingkat kematian kepiting sangat tinggi karena mempunyai sifat kanibal.
- Bisnis sistem *vertical crab house* telah dijalankan selama kurang lebih 5 tahun dimana 3 tahun pertama fokus pada

research and development, berupa *trial and error* sehingga bisa mendapatkan sistem penggemukan terbaik.

- Lokasi budi daya kepiting berukuran sekitar 6x16 meter dan mampu menampung 1.000 box. Artinya *sistem vertical crab house* merupakan sistem penyimpanan atau penggemukan kepiting dengan rumah soliter yang tidak membutuhkan ruang yang besar dan dapat memanfaatkan teknologi.
- Biaya pembuatan tempat atau rumah kepiting dengan ukuran 6x16 meter membutuhkan sekitar Rp26 juta dan telah dipatenkan oleh pelaku usaha dengan berbagai warna untuk menyesuaikan kondisi kepiting. Misal kepiting bertelur tempat warna kuning, kepiting pembesaran/penggemukan tempat warna biru dan sebagainya.
- Dalam pemanfaatan teknologi dibutuhkan sistem kualitas air yang tepat dan juga sistem pengairan, penempatan, maupun pemberian makannya juga harus diperhitungkan sesuai dengan karakter dan sifat dasar kepiting, agar kualitas mutu kepiting dapat terjaga dengan baik, sesuai permintaan (kebutuhan) dan tentunya pemilik usaha mendapatkan profit.
- Proses penggemukan kepiting umumnya memerlukan waktu 2-3 minggu hingga berukuran 500 gram. Namun jika menghendaki ukurannya lebih besar lagi, memerlukan tempat yang lebih besar lagi karena kepiting memerlukan proses *molting* (ganti kulit) untuk menambah bobot ukuran. Hanya saja saat ini budi daya kepiting hanya berkisar 500 gram saja, mengingat waktu ganti kulit tidak bisa diprediksi.
- Umumnya untuk penambahan ukuran kepiting dari setelah ganti kulit (*molting*) mampu mencapai hingga 200%, dengan durasi mengeraskan karapas memerlukan waktu sekitar 6 jam, dan apabila sudah 1-2 hari karapas kulit kepiting sudah mengeras secara optimal.
- Setelah proses penggantian kulit kepiting tersebut dapat dijual sebagai kepiting soka, artinya kepiting soka setelah dimasak/diolah dapat langsung dikonsumsi seluruh bagiannya karena masih lunak karapasnya. Hal ini cukup signifikan peminatnya di Indonesia.
- Tersedia juga pakan kepiting yang sudah dikemas sesuai dengan formula yang tepat hasil penelitian dan percobaan dari pembudi daya kepiting yang telah dipatenkan.
- Keunikan pemberian makan untuk kepiting adalah saat sore hari hingga malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, jika dikasih pakan tidak sesuai waktunya, maka menghasilkan kepiting yang tidak optimal ukurannya dan pakan yang tidak dimakan bisa menjadi racun karena mempunyai kandungan amoniak.

- Tenaga kerja dalam budi daya kepiting juga cukup sedikit, misal 1 orang mampu memelihara proses budi daya kepiting dengan kisaran jumlah 1.000 box.

b) Aspirasi:

- Pengiriman kepiting soka mengalami penurunan sejak ada kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, mengingat adanya Permen yang membatasi ukuran. walaupun beratnya sudah memenuhi permintaan customer namun jika ukurannya masih di bawah aturan maka dilarang dikirim ke tujuan.
- Perlu ada solusi dan upaya dukungan kebijakan yang dapat sinergi dengan pelaku usaha kepiting berupa regulasi yang tepat guna, meningkatkan ekonomi rakyat, dan peningkatan PNPB negara yang berbasis keberlanjutan sumber daya alam.

5) Provinsi Jawa Tengah (Kab. Semarang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 19 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Kampung Alpukat, Dusun Kalibening, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

- Wilayah Kalibening sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian bertani. Terdapat 75 Kepala Keluarga dan 47 orang diantaranya ikut melestarikan varietas Kalibening. Awal mula muncul komoditas Kalibening, dimulai tahun 2010 dimana masyarakat yang didampingi oleh BPTP, BPSB, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten dan Provinsi mendaftarkan varietas unggulan.
- Masyarakat membutuhkan waktu 3 tahun untuk mendapatkan ijin penangkar dan ijin edar komoditas alpukat Kalibening. Tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat Kalibening dapat berproduksi pada usia 3 tahun dan dalam 1 pohon dapat menghasilkan 4 varietas dengan berat bersih setiap buahnya mencapai 1,3-1,7 kg. Untuk mempertahankan dan menjaga varietas tersebut, masyarakat dengan rutin memberikan pencegahan terhadap hama melalui penggunaan pestisida setiap bulannya. Umur tanaman alpukat bisa mencapai 30 tahun dan ditanam di ketinggian 10 mdpl. Alpukat dataran rendah memiliki karakteristik kadar air sedikit sedangkan alpukat di dataran tinggi produktivitasnya lebih tinggi.
- Pohon induk yang teregister/terdaftar di BPSB ada 10 pohon induk, memperbanyak pohon induk sebanyak 33 batang/pohon indukan dan untuk 1 pohon induk dapat menghasilkan 4000-5000 batang/bibit. Dalam mengembangkan komoditas alpukat,

masyarakat terkendala dengan pemasaran. Saat ini, pemasaran yang dilakukan masyarakat Kalibening dibagi menjadi dua:

- Pemasaran bibit Alpukat Kalibening dilakukan melalui pengadaan, contohnya pengadaan bibit yang dilakukan oleh Pemerintah. Setiap tahunnya, masyarakat Kalibening mampu menghasilkan 50 ribu bibit alpukat Kalibening (karena keterbatasan lahan).
- Pemasaran buah untuk saat ini belum mampu ke market modern karena ketersediaannya terbatas. Untuk saat ini masyarakat sudah memiliki *buyer* yang berasal dari Astra (eksportir) namun masyarakat masih terkendala karena produktivitasnya yang masih belum terpenuhi dan tidak bisa kontinue. Meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar masyarakat luar Kalibening mampu menghasilkan alpukat Kalibening dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

6) Provinsi Jawa Barat (Purwakarta)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Pasar Induk Bungur Sari Purwakarta

- Pasokan dan harga bahan pangan pokok seperti beras, telur ayam, kedelai, cabe merah, bawang merah, bawang putih, sayuran dan buah-buahan berdasarkan keterangan dari para pedagangnya jumlah pasokannya cukup dan dengan pergerakan harga yang relatif stabil atau tidak mengalami kenaikan dalam menghadapi akhir tahun (kebutuhan natal dan tahun baru);
- Telur ayam mengalami kenaikan harga sebesar 3,23 persen dan sayuran jenis wortel mengalami penurunan sebesar 20 persen, komoditas lainnya dalam kondisi harga yang stabil.

b) Pengelolaan Sampah Pasar Induk Modern Bungur Sari

- Sampah pasar sudah dapat dikelola setiap harinya dengan menggunakan satu mesin pencacah. Sampah dipergunakan untuk pembuatan pupuk organik dan sebagian diperuntukkan sebagai makanan ternak;
- Dibutuhkan sekitar 7 (tujuh) unit tambahan mesin pencacah sampah (*chopper*) untuk mengelola sampah yang masuk setiap hari;
- Apabila kapasitas pengolahannya ditingkatkan, maka unit pengelolaan sampah tersebut secara ekonomis dapat membiaya sendiri dari hasil pengelolaan sampahnya;

- Unit pengolahan sampah tersebut dapat dikembangkan di pasar-pasar lainnya, sehingga masalah sampah tidak harus diolah dan diproses di tempat lain, sehingga akan lebih efisien dalam pengelolaannya.

7) Provinsi Banten (Kab. Tangerang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 November 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Mangrove (Eko-Wisata Mangrove Ketapang Urban *Aqua Culture*) Desa Ketapang, Kec. Mauk, Kab. Tangerang.

- a) Tantangan Pembangunan di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang
 - Rumah Tidak Layak Huni.
 - Persampahan.
 - Kemiskinan.
 - Abrasi Pantai.
 - Banjir Rob.
 - Berkurangnya Habitat Mangrove.
- b) Profil Kawasan Ketapang – Mauk
 - Luas Kawasan Kumuh Awal: 26,90 ha
 - Potensi Pengurangan Kumuh: 26,90 ha
 - Tipologi Permukiman: Tepi Air (Pesisir)
 - Pola Penanganan: Pemugaran/Peremajaan/Peningkatan Kualitas
 - Nama Program: Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Ketapang – Mauk
- c) Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove:
 - Luas areal tanaman mangrove kurang lebih 20 ha dan memiliki sekitar 300 ribu tanaman mangrove.
 - Pemerintah daerah kesulitan untuk memperluas lahan karena lahan disekeliling kawasan sudah dikuasai pengembang.
 - Perlu ada solusi agar kawasan mangrove bisa diperluas
 - Abrasi pantai yang semakin parah yakni sekitar kurang lebih sekitar 575 ha.
 - Keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
 - Rehabilitasi mangrove sangat sulit karena yang ditanam 720.000 belum tentu 50% dapat hidup, sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama semua pihak.
 - Pemerintah Kabupaten Tangerang meminta agar lahan perhutani yang sudah tidak dikelola agar dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.

- Pemerintah Kabupaten Tangerang meminta agar pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.

8) Provinsi Jawa Barat (Karawang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 13 s.d. 15 Desember 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Pindang

- Profil Pemindangan Ikan Cicinde Utara
Salah satu desa yang memiliki kelompok usaha pemindangan ikan adalah desa Cicinde Utara. Terdapat dua bentuk kelembagaan usaha pemindangan yaitu koperasi dan kelompok. Setiap anggota kelompok/koperasi memiliki tempat pengelolaan skala rumah tangga yang jumlahnya mencapai 926 unit dari 42 kelompok dengan estimasi tenaga kerja 1800-3000 orang. Jenis ikan yang diolah sebagai bahan baku terdiri dari 60% ikan cakalang/tongkol, 15% layang, 15% salem, dan 10% bandeng.
- Salah satu pemasok bahan baku yang dikunjungi adalah PD Tia Putra Jaya milik pak Jono. Usahanya telah memiliki cold storage berkapasitas 100 ton yang memasok ikan layang, salem, tongkol/cakalang, lemuru dan bandeng sebagai bahan baku pemindangan di Cicinde. Selama ini, bahan baku diperoleh dari Muara Baru-Muara Angke Jakarta, Dadap Tangerang, Bitung, Sibolga dan Juwana Pati.
- Beberapa masukan terkait peningkatan daya saing usaha pengolahan ikan pindang di Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
 - ✓ Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, maka dalam proses pembuatan, diharapkan adanya dukungan Pemerintah untuk memberikan bantuan pengadaan peralatan produksi berupa Baden (alat untuk memproses ikan pindang) yang berbahan aluminium.
 - ✓ Untuk menjamin kualitas bahan baku ikan yang berasal dari luar Karawang (Jakarta dan/atau Cirebon), diharapkan adanya bantuan pengadaan kendaraan roda empat dengan fasilitas pendingin ikan.
 - ✓ Untuk menjamin peningkatan pendapatan pengusaha ikan pindang, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai akses permodalan resmi agar pelaku usaha pengolahan ikan pindang di Desa Cicinde Utara dapat terbebas dari permodalan ilegal yang mengenakan bunga yang jauh lebih tinggi dari bunga bank.

b) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Berasal dari Limbah Pengolahan Ikan Pindang

- Limbah usaha pengolahan ikan pindang merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Proses dari pengolahan ikan pindang menghasilkan limbah cair dan limbah padat.
- Dalam pengoperasiannya pengolahan ikan pindang sangat membutuhkan air dalam jumlah besar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu dapat menurunkan kadar oksigen dalam perairan. Limbah cair industri pengolahan ikan akan berdampak buruk bagi lingkungan apabila jumlahnya terlalu banyak dan tidak diatasi dengan mereduksi secara alami. Selanjutnya dampak yang terjadi akibat pembuangan limbah cair dan padat dimaksud dapat berpotensi mengeluarkan bau yang tidak sedap dan akan mencemari lingkungan sekitar.
- Usaha pengolahan ikan pindang di Desa Cicende Utara belum mempergunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga jumlah limbah yang masuk ke lingkungan tanpa pengelolaan ini menyebabkan semakin beratnya beban lingkungan untuk menampung dan melakukan degradasi (self purification) terhadap limbah tersebut.
- Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merealisasikan pembangunan IPAL Komunal di Desa Cicende Utara, pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Cicende Utara terkait penyediaan lokasi untuk pembangunan IPAL Komunal dimaksud.
- Lebih jauh, pembangunan IPAL Komunal yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran air akan sangat mendukung target pengembangan usaha dari skala lokal menjadi skala nasional dan bahkan ekspor ke luar negeri, dimana kelayakan lingkungan merupakan salah satu syarat dalam pengembangan bisnis di era globalisasi.

9) Provinsi Jawa Tengah (Karanganyar)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 13 s.d. 15 Desember 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Ekowisata Perum Perhutani

- Ekowisata Perum Perhutani secara total sebanyak 843 lokasi obyek wisata yang terbagi di tiga divisi regional, 250 lokasi

obyek wisata berada di regional Jawa Barat dan Banten, 266 lokasi obyek wisata di regional Jawa Timur dan yang terbanyak lokasi obyek wisatanya di regional Jawa Tengah yaitu sebanyak 327 lokasi obyek wisata. Ragam daya tarik wisata Perum Perhutani terdiri dari 129 destinasi Air Terjun, 29 destinasi Bumi Perkemahan, 15 destinasi Goa, 56 destinasi Pantai, 133 destinasi Pegunungan, 11 destinasi Air Panas, 28 destinasi Sungai, Telaga, Waduk, 5 destinasi Kawah, 30 destinasi Hutan Alam, 353 destinasi Taman Rekreasi, 24 destinasi Situs dan 30 destinasi Minat Khusus.

- Pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisata ke destinasi ekowisata Perum Perhutani secara keseluruhan yaitu sebesar Rp240 miliar rupiah berdasarkan data hingga bulan november tahun 2022, pendapatan tahun 2021 sebesar Rp142,6 miliar dan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp153,8 miliar, serta pendapatan tahun 2019 sebesar Rp203,7 miliar. Dalam hal pengelolaannya destinasi ekowisata Perum Perhutani dilakukan dengan kelola mandiri dan dikelola secara kerja sama, dari 843 destinasi ekowisata Perum Perhutani, 808 destinasi ekowisata di antaranya dikelola secara kerja sama, dan hanya 35 destinasi ekowisata yang dikelola secara mandiri oleh Perum Perhutani. Penyelenggaraan ekowisata oleh Perum Perhutani telah menyerap tenaga kerja sebesar 5.847 orang petugas dan non petugas wisata, serta secara ekonomi mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sebesar Rp214,8 miliar rupiah.
- Proyek Strategis Ekowisata Perum Perhutani untuk mendukung pengelolaan ekowisata yaitu melalui proyek strategis rebranding wisata alam melalui 5 (lima) program yaitu diantaranya:
 - ✓ Standarisasi Pengelolaan;
 - ✓ Digitalisasi;
 - ✓ Penambahan fasilitas;
 - ✓ Pengembangan produk
 - ✓ Product identity banding
 - ✓ Sinergi BUMN wisata

b) Taman Sakura Sakral Cemoro Kandang Lawu

- Taman dan Bukit Sakura Lawu merupakan bagian dari Ekowisata Perhutani *Cluster* Lawu salah satu destinasi wisata baru yang ada di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di obyek ekowisata ini terdapat bunga sakura sebagai *icon* utamanya. Ditanamnya pohon sakura di obyek wisata ini sebagai bentuk tanda persahabatan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang telah terjalin dengan baik selama kurang lebih 60 tahun terakhir.

- Taman dan Bukit Sakura Lawu diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 27 Januari 2018. Dasar pelaksanaan perjanjian kerja sama multipihak PKS No. 18/043.7/PKS/2018 tentang Pembangunan Taman Bukit Sakura di Lawu, 3 Desember 2018 Adapun para pihak dalam perjanjian kerja sama tersebut yaitu:
 - ✓ Perhutani KPH Surakarta;
 - ✓ BALITBANGTEK Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
 - ✓ Toyota Motor Manufacturing Indonesia;
 - ✓ BKT Kebun Raya Cibodas LIPI;
 - ✓ Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Taman dan Bukit Sakura Lawu, terdiri dari Taman Sakura dengan luas 1,5 ha berada di petak 34-1 RPH Blumbang, BKPH Lawu Utara, KPH Surakarta, sedangkan Bukit Sakura dengan luas 0,25 ha petak 37-1 RPH Tlogodringgo, BKPH Lawu Utara, KPH Surakarta.
- Tujuan pelaksanaan penanaman tanaman Sakura (*Prunus sp.*) di Taman dan Bukit Sakura Lawu yaitu sebagai upaya koleksi jenis. Jenis wisata yang dibangun adalah jenis wisata edukasi dan estetika, sebagai penelitian, pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang didukung oleh kegiatan: penyediaan bibit bunga sakura, penanaman dan perawatan bunga sakura, serta penyediaan sarana prasarana taman. Pendanaan bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (MI), dengan jangka waktu kerja sama selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak 3 Desember 2018 sampai dengan 2 Desember 2020. *Update* perkembangan kerja sama adalah sebagai berikut:
 - ✓ Kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan Sakura sudah dilaksanakan sejak 2018;
 - ✓ PKS berakhir 2 Desember 2020 dan PARA PIHAK belum memproses perpanjangan karena terkendala pandemi Covid-19;
 - ✓ Melalui surat Manager *Corporate Social Responsibility*, PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia tanggal 28 November 2022 berkomitmen melanjutkan kerja sama pengembangan eduwisata dan konservasi *Prunus Spp* melalui skema CSR.

10) Provinsi Banten

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 13 s.d. 15 Desember 2022.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Kunjungan Ke Pasar Rau Kota Serang

- Komisi IV DPR RI melakukan sidak ke Pasar Induk Rau (PIR) dalam rangka memastikan stok pangan dan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
- Hasil pemantauan terhadap harga beberapa komoditas pangan, diantaranya bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp30.000,00/kg dari sebelumnya Rp28.000,00/kg. Telur ayam kisaran Rp31.000,00/kg - Rp32.000,00/kg naik dari sebelumnya Rp25.000,00/kg. Beras medium kisaran Rp11.500,00/kg hingga Rp12.500,00/kg, dimana disampaikan pasokan beras ke toko tersendat. Harga cabai rawit juga mengalami kenaikan harga, saat ini Rp50.000,00/kg dari harga normal Rp30.000,00/kg. Harga minyak goreng kemasan yang diproduksi berdasarkan inisiasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan merek 'Kita'. Harga minyak tersebut mulanya dipatok Rp14.000,00/liter, namun saat ini ditemukan harga Rp15.000,00/liternya. Sementara itu, harga bawang putih meskipun mengalami kenaikan Rp1000,00/kg menjadi rata-rata Rp24.000,00/kg, dinilai para pedagang, hal tersebut masih relatif normal.
- Selain itu, harga daging sapi juga mengalami kenaikan mencapai Rp140.000,00/kg. Harga ayam potong saat ini sudah mencapai Rp34.000,00-Rp35.000,00 dari sebelumnya Rp28.000,00. Beberapa kekhawatiran disampaikan oleh para pedagang, bahwa biasanya pada akhir tahun permintaan ayam potong mengalami kenaikan, diprediksi ada kenaikan harga. Adapun untuk harga ikan dan hasil laut lainnya tidak mengalami kenaikan.

b) Kunjungan ke Penggilingan Padi CV Sri Padi dan PT Wilmar Padi Indonesia Serang

- Diperoleh informasi bahwa kondisi penggilingan sejak awal Desember 2022 tidak beroperasi. Salah satu penyebabnya karena kesulitan bahan baku. Sulitnya mendapatkan beras, mengakibatkan harga GKP yang didapat oleh penggilingan di tingkat petani adalah Rp6.100,00 hingga Rp6.300,00 per kg, dengan HPP di harga Rp10.500,00 - Rp11.000,00 per kg. Pihak penggilingan padi berharap, Perum Bulog dapat menyerap beras yang ada dengan harga pasar yang saat ini sedang mengalami kenaikan.
- PT Wilmar Padi Indonesia, dengan berkapasitas 600 ton beras per hari, sanggup memasok beras ke Perum Bulog 3.000 ton. PT Wilmar sudah mengoperasikan tiga pabrik yakni di Nganjuk, Mojokerto, dan Serang. Pada 2021, pengadaan gabah petani 230.313 ton gabah kering giling (GKG) dan tahun 2022 membeli gabah 331.546 ton GKG. PT Wilmar bukan hanya mengolah

beras saja tetapi ada bekatul, sekam, serta menir yang dijual juga. Jadi produk turunannya banyak, berbeda dengan penggilingan kecil, sehingga PT Wilmar bisa membeli gabah dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan pengepul lain. Oleh sebab itu, disarankan agar PT Wilmar memiliki spesialisasi untuk memproduksi beras komersil, dengan proporsi 70%, sehingga beras medium dapat diproduksi oleh penggilingan kecil dan menengah. PT Wilmar juga menyanggupi untuk memasok beras ke Perum Bulog sebanyak 3.000 ton sebagai bentuk kerja sama awal.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

1) Rapat Kerja/RDP dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Holding Pangan/ID FOOD, tanggal 7 Desember 2022, membahas mengenai Data Angka Sementara Produk Komoditas Pangan (Padi, Jagung, dan Kedelai) serta Komoditas Lainnya, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan paparan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama Perum BULOG mengenai posisi stok beras dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama Perum BULOG untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok lainnya dengan fakta di lapangan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau proyeksi area pertanaman padi untuk memastikan angka produksi pada saat panen raya di bulan Maret 2023 dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2023.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Badan Pangan Nasional untuk meninjau ulang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras yang saat ini mengalami perubahan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk melakukan penyerapan secara maksimal setiap panen untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) **RDP** dengan Eselon I Kementerian Pertanian tanggal 15 November 2022, membahas mengenai Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
 1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian melalui program strategis dan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani, termasuk kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat.
 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi, validasi dan perbaikan mekanisme pengambilan data produksi pertanian dan hasilnya diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi target produksi pertanian serta melakukan evaluasi program-program yang tidak berdampak langsung kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang ulang program dan kegiatan yang lebih terukur dan realistis dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim, diantaranya melalui pembangunan embung dengan teknologi plastik/geomembran, benih unggul, serta sarana dan prasarana pertanian.
 4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi anggaran Pupuk Bersubsidi.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022 dan Rapat Dengar Pendapat tanggal 4 April 2022 serta melaporkan progres penyelesaiannya kepada Komisi IV DPR RI.
 6. Komisi IV DPR RI bersama dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian akan meninjau ulang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan bila diperlukan diusulkan untuk dilakukan revisi.
 7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan seluruh data pegawai dengan status Plt beserta lama jabatan pejabat Eselon II, III, dan IV, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat Dengar Pendapat ini.
 8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data dan laporan seluruh kegiatan *Food Estate*

sejak pertama kali dilaksanakan termasuk data anggaran dan produksi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat Dengar Pendapat ini.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti seluruh keputusan rapat dengan komisi IV DPR RI.

2) RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), tanggal 16 November 2022, membahas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar, Rp103.525.552.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan usulan tambahan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.282.729.435.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akan dibahas secara mendalam pada rapat selanjutnya.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kepala Badan Pangan Nasional untuk menjabarkan konsep dan peta jalan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan secara terstruktur serta dalam bentuk program, dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.
4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan hutang Pemerintah yang belum dibayarkan kepada Perum BULOG sebesar Rp5.131.044.750.000,00 (lima triliun seratus tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Komisi IV DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG untuk memenuhi stok beras minimal untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar ada perputaran stok CPP.

3) RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*, tanggal 23 November 2022, melanjutkan rapat tanggal 15 November 2022 (membahas mengenai Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas), memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya, dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian sebesar Rp15.318.655.827.000,00 (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.473.598.597.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp154.221.814.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp2.737.330.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.014.155.508.000,00 (satu triliun empat belas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.099.539.166.000,00 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.816.556.075.000,00 (dua triliun delapan ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp3.100.741.155.000,00 (tiga triliun seratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - h. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sebesar Rp903.810.826.000,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, sebesar Rp946.043.124.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - j. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.072.659.407.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana program dan kegiatan

memperhatikan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat, diantaranya peningkatan logistik benih/nursery, pengembangan ternak, pengembalian kesuburan lahan, UPPO, dan sarana prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian pra panen dan pascapanen).

2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementerian Pertanian menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli oleh Perum BULOG dengan harga komersial dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jika dalam 6 (enam) hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran Tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
- 4) **RDP** dengan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT Inhutani I, dan Direktur Utama PT Inhutani V, tanggal 6 Desember 2022, membahas mengenai Kinerja Perusahaan, Rencana dan Program Strategis Tahun 2022-2023, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perkebunan dan Bidang Kehutanan untuk meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas hutan dan kebun sebagai aset milik perusahaan.
 2. Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk berkolaborasi dalam program-program strategis Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan/atau Sosialisasi Program-program Berbasis Kemasyarakatan antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan melibatkan Komisi IV DPR RI.
 4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pengembangan usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha yang dilakukan oleh Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) agar dapat

meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Negara di sektor perkebunan dengan tetap melibatkan petani, UMKM, dan masyarakat sekitar.

5. Komisi IV DPR RI mendukung agar Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani segera menyelesaikan konflik lahan yang berada di wilayah kerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani, khususnya lahan yang dikuasai oleh rakyat/petani dengan memberikan solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial.
6. Komisi IV DPR RI mendukung upaya pengelolaan aset Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani diantaranya melalui kegiatan agrowisata, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan budaya.
7. Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi aset yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, guna mengurangi beban hutang/kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan, pengelolaan, dan pengendalian manajemen secara profesional.
8. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pada Tahun 2023, dalam rangka membahas Perkebunan Sawit Rakyat dan Pengelolaan Agrowisata.
9. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Perum Perhutani pada Tahun 2023, dalam rangka membahas Pengelolaan Ekowisata dan Program Kelestarian Sumber Daya Hutan.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

- 1) **RDPU** dengan Para Pakar/Pemerhati Lingkungan membahas mengenai Konservasi Berbasis Nilai untuk Pertumbuhan Sosial-Ekonomi melalui Kawasan Konservasi, tanggal 2 November 2022 membahas mengenai Konservasi Berbasis Nilai untuk Pertumbuhan Sosial-Ekonomi melalui Kawasan Konservasi, dengan catatan:
 1. Perlu menjaga kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati yang tinggi dan berlimpah baik di darat, perairan, maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia karena dikenal sebagai salah satu negara mega bio-diversitas di dunia.
 2. Perlu dilakukan pengelolaan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya

bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang.

3. Perlu ada respon dari Pakar/Pemerhati Lingkungan Indonesia untuk memberikan masukan dan saran dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana RUU ini merupakan usulan inisiatif yang diajukan oleh DPR RI dan telah masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.
4. Perlu dibangun semangat yang sama memperbaiki tata kelola Konservasi di Indonesia agar lebih baik lagi guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam dengan memanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
5. Perlu ada perhatian serius dalam penanganan stunting gizi buruk generasi mendatang agar status gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat dan generasinya mampu bersaing di level dunia, karena jika tidak segera diatasi generasi mendatang fisiknya lemah dan kecerdasannya rendah (a lost generation).
6. Perlu ada perhatian lebih dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat berdasarkan data di tahun 2019, Indonesia berada di urutan ke-107 dari 189 negara, atau peringkat ke-6 di ASEAN.
7. Perlu melakukan identifikasi dan memetakan akar penyebab kegagalan Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau "Marine Protected Area" di Indonesia, dan mencari solusi untuk membuat KKL lebih berhasil dalam memperkuat pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Perlu memenuhi target 30% kawasan konservasi di tahun 2030, dengan pendekatan:
 - a. Pemilihan lokasi yang tepat dan pembentukan Kawasan Konservasi Laut (1) proses berbasis sains; (2) melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan utama lainnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga Monitoring dan evaluasi.
 - b. Menyediakan lebih banyak sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitas, dan anggaran untuk memilih, merancang, dan mengoperasionalkan lebih banyak unit KKL di seluruh negeri sehingga total luas Kawasan Konservasi Laut memenuhi 30% dari total perairan laut Indonesia pada tahun 2030.
8. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi Kawasan Konservasi Laut bagi pembangunan ekonomi dan peradaban manusia yang berkelanjutan.
9. Perlu adanya keberpihakan dari pemangku kepentingan akan penyediaan alokasi anggaran untuk menjaga, melindungi dan

memanfaatkan kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dengan bijak dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam.

10. Perlu ada penanggulangan pencemaran plastik di laut dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim dunia dan serta menjaga kerusakan mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang merupakan ekosistem dari sumberdaya ikan.
 11. Perlu penajaman “Roadmap Konservasi Laut Indonesia”, dimana dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dan mampu meningkatkan sistem kelembagaan/SDM, infrastruktur sarana prasarana dan memberikan ruang bantuan pembiayaan modal bagi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.
 12. Perlu ada intervensi terhadap alokasi kawasan laut dengan menata ruang laut yang terintegrasi dan bertanggungjawab serta memberikan insentif kepada daerah/individual jika mampu menjaga atau mengkonservasi sumber daya alam sehingga kemitraan dan keuntungan dapat langsung dinikmati oleh pemangku kepentingan dan kehadiran negara dirasakan dampaknya.
- 2) **RDPU** dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia serta Pengusaha Pedagang Beras, tanggal 7 Desember 2022 membahas mengenai Ketersediaan Gabah/beras di Penggilingan, dengan catatan:
- a) **PERPADI:**
 - Berharap agar Pemerintah tidak membeli beras untuk Cadangan ketika baru saja panen, dan mengusulkan jika untuk mengendalikan harga Pemerintah harus mengeluarkan stok beras yang sudah berada di gudang karena apabila stok berkurang dilapangan maka akan berdampak kepada kenaikan harga.
 - Perpadi pada bulan Agustus sudah menyampaikan jika stok beras akan mengalami penurunan dan dengan kondisi tersebut, diharapkan Pemerintah secepatnya melakukan impor (untuk *buffer stock*) dan diharapkan bulan Februari-April 2023 Perum BULOG melakukan pengadaan beras.
 - b) **Koperasi Beras Pasar Induk Cipinang:**
 - Kami berharap agar stok beras ada dilapangan walaupun harganya mahal untuk kami jual kepada konsumen kami.
 - Kita boleh saja melakukan impor tetapi tidak ketika saat sedang panen berlangsung.

c) CV Sumber Pangan Jawa Timur:

- Menilai data BPS perlu dipertanyakan ke validannya dengan melihat metode penghitungan yang telah BPS lakukan.
- Meyakini bahwa stok beras nasional menurun, karena jika stok tidak menurun tidak terjadi kenaikan harga dilapangan.
- Menyampaikan Jumlah stok di Pasar Cipinang saat ini sekitar 20-25 ribu ton.

4. Audiensi

Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Komisi II DPRD Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

a. DPRD Kab. Tabalong menyampaikan permasalahan dan konsultasi mengenai Pengawasan Perizinan Perkebunan di Daerah pada tanggal 10 November 2022, dengan catatan:

- 1) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan bahwa lebih dari 60% masyarakat Kabupaten Tabalong menggantungkan hidup mereka dari hasil kebun karet dan sawit serta komoditas perkebunan maupun pertanian lainnya. Selanjutnya menyampaikan mengenai harga karet yang jatuh dan menyarankan untuk mengganti varietas tanaman namun keterbatasan lahan menjadi masalah.
- 2) Komisi II DPRD Kab. Tabalong meminta dukungan mengenai pemanfaatan lahan PT Adaro/lahan bekas tambang yang sudah tidak dimanfaatkan oleh perusahaan tambang untuk digunakan menjadi lahan perkebunan bagi masyarakat.
- 3) Komisi II DPRD Kab. Tabalong meminta dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan komoditas perkebunan di Kab. Tabalong.
- 4) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan masyarakat dari beberapa desa dan kampung tidak dapat atau kesulitan untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka dikarenakan tidak adanya akses jalan. Pembangunan jalan melewati lahan-lahan milik korporasi dan/atau kawasan hutan tidak memungkinkan untuk dibangun, karena tersebut melanggar peraturan yang berlaku.
- 5) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan Izin KP IUPK PT Adaro Indonesia (tambang batubara) sudah hampir 30 tahun beroperasi di Kabupaten Tabalong, namun belum memberikan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, masyarakat berharap ketika PK2B PT Adaro Indonesia di Kabupaten Adaro, lahan bekas tambang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan perkebunan dan pertanian.
- 6) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan penerbitan izin-izin lahan maupun kawasan hutan untuk tambang batubara masih terus dibuka di tengah kebutuhan akan lahan bagi masyarakat petani yang

begitu tinggi, bahkan laporan dari masyarakat, beberapa tambang batubara telah menyerobot lahan masyarakat petani.

- 7) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah membangun 2 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara untuk mendukung operasional tambang batubara, dampak yang kemudian muncul akibat operasional dari pembangkit listrik tersebut ditambah satu pabrik semen adalah diduga telah menurunkan produktivitas produksi hasil pertanian sebagai akibat dari pencemaran udara yang ditimbulkan.
- 8) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan dampak dari tingginya aktivitas tambang batubara di Kabupaten Tabalong, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terjadinya banjir.
- 9) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan banyak perusahaan HTI, HPH maupun perusahaan tambang batubara di Kab. Tabalong belum melaksanakan dengan sepenuhnya program CSR.
- 10) Komisi II DPRD Kab. Tabalong menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh beberapa perusahaan di sekitar desa, mencanangkan desa mandiri melalui komoditas tanaman kopi.
- 11) Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong melalui Komisi IV DPR RI meminta bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian terkait untuk dapat membantu masyarakat Kabupaten Tabalong, terkait:
 - a) Pemberian dan pembukaan akses lahan dan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan;
 - b) Pengawasan terhadap 42 perizinan perkebunan, 3 (tiga) perusahaan vakum dan 1 (satu) perusahaan yang dicabut izinnya; dan
 - c) PPH 22 terkait komoditas karet, serta meminta bantuan klon baru dari tanaman karet (Kementerian Pertanian).

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, Komisi IV DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke:

1. Negara Australia

a. Pertemuan dan Diskusi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan *Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry (DAFF)*

1) Sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia

- a) Indonesia telah menjadi salah satu mitra dagang utama Australia mengingat letak geografisnya yang berdekatan. Dari sisi ekonomi,

industri pertanian menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki Australia.

- b) Hal ini ditunjukkan dengan ekspor sapi dan gandum yang konstan ke seluruh dunia, dimana Indonesia merupakan salah satu target pasar yang besar untuk sapi hidup Australia dan biji-bijian dalam jumlah yang signifikan. Selama bertahun-tahun, ternak hidup dan biji-bijian dari Australia telah berkontribusi besar dalam memenuhi permintaan Indonesia.
- c) Ketidakpastian pemasok pertanian global, terutama dengan krisis di Ukraina dan guncangan ekonomi di Argentina, akan menempatkan Australia sebagai mitra yang lebih penting lagi bagi Indonesia.
- d) Diharapkan Australia lebih memperhatikan tetangga terkuat dan terdekatnya, Indonesia. Dapat diyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki minat yang sama untuk lebih mengembangkan industri pertanian.
- e) Salah satu hal penting yang menjadi dasar adalah implementasi Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) sejak Juli 2020 memungkinkan upaya peningkatan kerja sama pertanian kedua negara. Lebih lanjut IA-CEPA akan memperluas kesempatan untuk berinvestasi di sektor pertanian baik di Indonesia maupun di Australia.
- f) Jurnal penelitian yang diterbitkan oleh LPEM UI, telah menyarankan investasi Indonesia pada domba, daging sapi beku, dan gandum di Australia akan menguntungkan kedua negara. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh diabaikan.
- g) Selain potensi tersebut di atas, Indonesia dan Australia juga memiliki kemitraan yang kuat dengan Kemitraan Daging Merah dan Sapi, yang dimaksudkan untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk meningkatkan rantai pasokan sektor daging merah dan sapi di Indonesia dan untuk mempromosikan lingkungan perdagangan dan investasi yang stabil antara Indonesia dan Australia.
- h) Australia juga telah mendukung Indonesia untuk Integrasi Sapi-Sawit, di mana Australia telah menetapkan tiga proyek percontohan di Kalimantan dan Lampung, yaitu sebagai berikut:
 - Dengan luas perkebunan sawit 16 juta hektar, Indonesia berpotensi membudidayakan 5 juta ekor sapi di Perkebunan Kelapa Sawit.
 - Produksi Kernel Kelapa Sawit Indonesia yang tinggi juga berpotensi menjadi bagian integral dari pakan ternak.
 - Dengan produksi Kernel Kelapa Sawit sebesar 9 juta ton, merupakan potensi yang harus kita akui karena pakan ternak memakan biaya hingga 80% dari biaya produksi ternak.

- i) Ketika disebutkan bahwa kemitraan pertanian Indonesia-Australia, tidak boleh dilupakan bahwa Australia telah membantu Indonesia mengatasi penyakit ternak. Tahun 2022 Indonesia telah menerima puluhan ribu dosis Vaksin Penyakit Kulit Menggumpal dan 3 juta dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku. Inilah bentuk kemitraan yang sesungguhnya, yang harus kita hargai dengan tinggi.
- j) Australia juga telah menjadi kontributor besar bagi upaya Indonesia mencapai tujuan lingkungan, yaitu sebagai berikut:
 - Kedua Pimpinan telah menjalin komitmen untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti yang selalu dilontarkan dalam setiap pertemuan mereka.
 - Australia juga telah menjanjikan komitmen 200 juta AUD untuk mendukung infrastruktur Indonesia dan pembangunan berkelanjutan.
- k) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diharapkan kemitraan Indonesia dan Australia di bidang pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan dapat lebih ditingkatkan.

2) **Paparan dan Diskusi dengan *Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry (DAFF)***

Pertemuan dilakukan dalam rangka membahas isu terkini yang dihadapi oleh Australia dan Indonesia serta potensi kerja sama antara Australia dengan Indonesia, dengan catatan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi prioritas utama dalam kerja sama yang dilakukan oleh Australia, terutama terkait ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan.

- a) Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* oleh Duanne Bridger (Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)

Dalam memberantas IUU Fishing, Australia menerapkan pendekatan lintas area. Di lapangan, otoritas menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan illegal. Guna melakukan pencegahan, dilakukan koordinasi yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral dimana Indonesia juga memegang peranan penting dalam hubungan tersebut.
- b) *Biosecurity* oleh Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sebagai bagian penting dalam mempertahankan keamanan pangan, Australia menerapkan kebijakan *biosecurity* dalam menghentikan pemasukan dan penyebaran hama & penyakit berbahaya.
- c) Manajemen Limbah Plastik oleh Dr. Jessica Lear (Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air)

- Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk serta berperan penting dalam mendukung negosiasi menuju kesepakatan internasional tentang sampah laut dan mikroplastik.
 - Australia bergabung dengan Koalisi Ambisi Tinggi untuk Mengakhiri Polusi Plastik.
 - Komite Perundingan Internasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan draf perjanjian yang mengikat secara global pada akhir tahun 2024.
- d) Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia oleh Peter Venslovas (*Australian Fisheries Management Authority*)
Lembaga ini berperan dalam melakukan pengawasan praktik usaha perikanan. Lembaga bertanggung jawab dalam menjamin kelestarian sumber daya perikanan, dengan menerapkan berbagai strategi seperti:
- Pencegahan yang mencakup penangkapan kapal ilegal, pengawasan udara, hingga intersepsi apabila dibutuhkan;
 - Pendidikan yang mencakup sosialisasi kepada stakeholder terkait; serta
 - Kolaborasi yang mencakup kerja sama antar negara, baik bilateral maupun multilateral.
- e) Peran Australia dalam COP27 oleh Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air
Sebagaimana hasil Konferensi Perubahan Iklim yang diadakan oleh PBB pada November 2022 (COP27), Australia berkomitmen dalam membangun Kembali peran dan reputasinya dalam mengurangi emisi karbon. Adapun target emisi karbon 0% di Australia diharapkan tercapai pada tahun 2050.
- f) Bantuan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) oleh Kementerian Luar Negeri Australia
Australia telah mengumumkan pengiriman 3 juta dosis vaksin PMK yang akan diberikan untuk Indonesia sebagai tambahan atas 1 juta dosis vaksin yang telah dikirimkan sebelumnya (total bantuan vaksin PMK sebanyak 4 juta dosis). Hal tersebut merupakan bagian dari program biosecurity senilai AUO 10 juta yang didanai oleh Oepartemen Luar Negeri dan Perdagangan (OFAT) Australia untuk mendukung respons Indonesia terhadap PMK.

b. Pertemuan dengan Parlemen Australia di Kantor Parlemen Australia, Canberra

- 1) Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Maka dari itu, ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (*food sovereignty*) dan mandiri (*food resilience*). Indonesia menilai bahwa

ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melawati kondisi pandemi pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadikannya sebagai tantangan menuju masa depan dengan berupaya melakukan berbakat dan inovasi dalam menghadapi era global untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan perlindungan pangan di masa mendatang. Melalui beberapa diskusi yang sudah dilakukan dalam kesempatan Kunjungan Kerja ini, Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan dan juga komitmen dari Pemerintah Australia bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi prioritas kerja sama Australia.

- 2) Dalam kesempatan ini Komisi IV DPR RI Kembali menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi. Kami ingin memastikan ke depannya hal-hal tersebut dapat dinavigasi dan diselesaikan dengan cepat, efisien dan melibatkan para ahli yang tepat. Kami percaya Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang berdasarkan rasa saling menghormati, berdasarkan persahabatan, banyak kerja sama yang sudah dilakukan. Diharapkan kemitraan antara berbagai tingkat pemerintahan, serta sektor swasta dan masyarakat sipil dapat diperbaiki dan tingkatkan.

Lebih jauh Komisi IV DPR RI menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan vaksin yang telah dan akan disalurkan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah mewabah di banyak daerah di Indonesia. Melalui kerja sama yang telah dan akan dilakukan, Indonesia akan banyak belajar dari Australia terkait mitigasi wabah dan penyakit menular, terutama jenis yang menjadi bahan pangan di Indonesia.

- 3) Melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Republik Indonesia yang dirklarasikan pada bulan November 2016, Indonesia berkomitmen dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional dengan target unconditional sebesar 29% dan target *conditional* sampai dengan 41% dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) di tahun 2030. Saat ini target tersebut telah ditingkatkan hingga 32% dengan upaya sendiri dan menjadi 42% dengan bantuan internasional. Beberapa program utama Indonesia dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan adalah melakukan mitigasi dan mengurangi deforestasi dengan sangat cepat, yang telah dicapai dengan cukup baik, terutama beberapa tahun terakhir; upaya mitigasi terhadap kebakaran hutan juga cukup berhasil. Sebenarnya program utama Indonesia adalah memastikan program ini terus berkembang hingga tahun 2030. Selanjutnya, program transisi menuju energi bersih, sebenarnya cukup menantang, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seghingga melakukan transisi sumber energi dari pertambangan yang merupakan sumberdaya yang

tidak dapat diperbaharui menjadi energi baru dan terbarukan adalah suatu keniscayaan.

- 4) Sektor kelautan dan perikanan menawarkan tantangan yang juga besar. Terdapat peluang untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Mitra kami, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedang mencoba untuk memperkenalkan karbon biru, mengintegrasikan konservasi ekosistem laut, serta pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, termasuk di dalamnya pengawasan yang lebih kuat melalui penangkapan ikan terukur dalam rangka mewujudkan ekonomi biru.

c. Kunjungan dan Diskusi di Tarin Grove, *Cattle Farm* Milik Mr. Ross Crump (Pternakan Sapi) di Hunter Valley, New South Wales

- 1) Pengelolaan sapi di Australia telah memenuhi regulasi terkait Good Manufacturing Process (GMP), sehingga daging yang dihasilkan oleh Australia telah memenuhi syarat-syarat standar keamanan pangan. Australia juga menerapkan standar keamanan ketat untuk menghindari kontaminan asing seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- 2) Gambaran umum proses produksi daging sapi di Australia adalah sebagaimana berikut:
 - a) Pengembangbiakan sapi dimulai dari indukan sapi. Seekor sapi akan melahirkan anak betina (heifer) atau anak jantan (bull) dengan waktu kehamilan adalah 285 hari.
 - b) Heifer akan dipelihara dan dipersiapkan untuk dikawinkan. Heifer dapat memasuki siklus produksi daging sapi atau dipelihara di peternakan untuk berkembang-biak.
 - c) Bull dapat memasuki siklus produksi daging sapi sebagai sapi jantan (dikebiri) atau dipelihara sebagai sapi jantan untuk tujuan perkembangbiakan di masa mendatang. Seekor sapi pejantan akan berkembang-biak secara alami atau memberikan sperma untuk inseminasi buatan.
 - d) Sapi-sapi akan merumput dan dapat diberi pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saat mereka tumbuh dan menjadi dewasa. Sapi-sapi dipasang ear-tag sebagai registrasi dan syarat traceability. Pakan hanya berupa rumput alami atau rumput oat. Ketika masuk feedlot, baru diberikan tambahan nutrisi pada pakan sapi.
 - e) Penggemukan sapi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dipelihara di feed-yard dan di peternakan. Setelah ternak memenuhi berat yang ideal, sapi kemudian dikirim ke rumah potong hewan untuk dipotong dan dikemas.
 - f) Sebagian besar sapi yang dikembangbiakkan berasal dari jenis Hereford, Brahman, Box Indicus dan Box Taurus, serta Angus.

d. Kunjungan dan Diskusi di *Hanging Tree Wines* (Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Anggur dan Zaitun) di Hunter Valley, New South Wales

- 1) *Hanging Tree Wines* terletak di jantung Hunter Valley, New South Wales. Tempat ini memiliki kebun anggur seluas 40 are, yang terhampar di salah satu punggung bukit Pokolbin yang paling indah, menghadap ke lembah hingga pemandangan Pegunungan Brokenback yang tak terhalang.
- 2) *Hanging Tree Wines* memilih sendiri anggur yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis anggur bersoda, putih, merah, manis, serta fortified wine. Pada areal perkebunan ini, juga terdapat lebih dari 300 pohon zaitun yang digunakan untuk membuat buah zaitun, tapenade, dan olive oil.
- 3) Properti yang terdapat pada areal perkebunan anggur ini penuh dengan sejarah dan pesona pedesaan, dengan warisan *Blacksmith's Cottage & Horse Whisperer's Lodge* yang masih berdiri di tempat. Perkebunan itu dulunya adalah peternakan sapi tua, di mana pohon tertentu digunakan oleh penduduk setempat untuk menggantung ternak. Pohon ini masih berdiri di depan properti dan kami memilih untuk mempertahankan nama perkebunan untuk menghormati sejarahnya.

2. Negara Turki

a. Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Turki di Ankara

Pada pertemuan ini, Delegasi Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran secara ringkas perkembangan hubungan kerjasama Indonesia-Republik Turki serta potensi kerjasama dan prioritas program KBRI di masa yang akan datang. Selain itu, disampaikan bahwa baik Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah memiliki perspektif yang sama dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral antara RI dengan Republik Turki di berbagai bidang, terutama ekonomi perdagangan, investasi, pertanian/pangan dan kelautan/perikanan.

Secara umum disampaikan bahwa pertanian di Turki termasuk maju, dengan mengadopsi sistem pertanian Israel. Sebagai contoh, Turki menggunakan sistem "deep irrigation technology" untuk pertanian. Kemudian disampaikan bahwa perdagangan Indonesia-Turki sebesar USD 2,2 juta, dimana ekspor sebesar USD 1,6 juta. Namun, ekspor Indonesia ke Turki sebagaimana besar berupa barang ½ jadi, seperti minyak sawit, benang.

Perlu diversifikasi produk ekspor, seperti pupuk urea granul, meskipun di satu sisi Indonesia juga mengalami keterbatasan dalam ekspor pupuk. Selain pupuk, peluang ekspor lain juga buah-buahan tropis (turki merupakan Negara pengkonsumsi ke-4 terbesar di dunia). Hal yang menjadi poin penting adalah akses pasar, terutama di sektor Pertanian.

Dalam pertemuan, Komisi IV DPR RI meminta agar mitra Komisi IV DPR RI menekankan untuk memaksimalkan dan follow up beberapa potensi kerja sama antar kedua Negara.

b. Pertemuan dengan pihak *Türkiye Büyük Millet Meclisi (Grand National Assembly of Turkey)*

Pada pertemuan ini, Delegasi Komisi IV DPR RI diterima oleh anggota parlemen komisi pertanian, kehutanan, dan pedesaan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yunus Kilic.

Parlemen Turki sendiri terdiri dari lima ratus lima puluh (550) anggota yang secara langsung dipilih dari 81 provinsi dan 85 kabupaten pemilihan secara keseluruhan. Pada pertemuan ini disampaikan kepada Komisi IV DPR RI bahwa hubungan kedua negara telah mencapai tahapan yang baik, ditandai dengan tingginya frekuensi pertemuan yang telah dilaksanakan, terutama dalam hubungan antar pertemuan. Bagi Republik Turki, hubungan dengan Indonesia merupakan salah satu prioritas bukan saja Indonesia merupakan negara besar, namun juga memiliki pendekatan yang sama dalam masalah-masalah global. Pihak Republik Turki melihat adanya prospek yang baik dalam pengembangan kerja sama di berbagai bidang, khususnya bidang pertanian dan agraria. Dengan keunggulan yang dimiliki, disampaikan bahwa Republik Turki siap untuk melakukan kerja sama dengan pihak Indonesia, termasuk industri pertahanan.

Kerja sama Turki dengan Indonesia berlangsung sejak tahun 1950-an, dimana Turki membeli CPO dari Indonesia dengan nilai transaksi perdagangan mencapai USD.10 Milyar. Selain itu, Turki juga memiliki jasa konstruksi yang diharapkan dapat bekerjasama untuk pembangunan IKN. Kebutuhan Turki akan buah segar menjadi perhatian anggota DPR RI, mengingat hasil pertanian di Indonesia terkait buah segar sangat berlimpah. Perlu penjajakan bisnis bilateral antara negara, termasuk kebutuhan pupuk dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Apalagi dengan adanya perubahan iklim, tentu saja akan mempengaruhi pasokan/suplai makanan. Saat ini Turki sedang berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi terutama di wilayah mediteranian Turki. Namun, Kementerian Pertanian Turki telah dapat mengatasi serangan OPT sebagai dampak perubahan iklim dan konservasi sumber daya air dengan pembangunan bendungan atau embung untuk penampungan air dibawah tanah.

Dalam pertemuan juga disinggung mengenai tingkat kunjungan turis ke Turki dari berbagai negara termasuk Indonesia sangat banyak, hal ini menjadi pendapatan pariwisata bagi Turki. Selain itu, keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi perhatian Parlemen Turki, yang saat ini jumlah perempuan sebagai anggota DPR RI mencapai 20% dari total anggota parlemen Indonesia. Pada pertemuan ini, keduabelah pihak

bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor pertanian dan perikanan yang melibatkan seluruh stakeholders terkait. Lebih lanjut lagi, delegasi Komisi IV DPR RI menggarisbawahi nilai penting kerja sama dan kemitraan Indonesia-Republik Turki dalam segala bidang, dan berkomitmen mendorong kerjasama berbagai sektor bidang kerja Komisi IV DPR RI. Secara khusus, Komisi IV DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mengharapkan dapat memperoleh informasi kemajuan sektor pangan di Republik Turki dalam konteks ketahanan pangan melalui *transfer of knowledge* dan *exchange of views*
- 2) Mengharapkan adanya kerjasama yang lebih erat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan; serta mengharapkan kerja sama investasi dalam bidang perikanan
- 3) Kunjungan Diplomasi ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan dalam penerapan program pembangunan di bidang pertanian dan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan serta implementasi prioritas kebijakan di bidang tersebut dilaksanakan di Turki.

c. Pertemuan dengan pihak *Republic Of Turkey Ministry Of Food, Agriculture And Livestock*

Pada pertemuan ini, delegasi diterima oleh Delegasi dari pihak Kementerian, dengan dipimpin oleh A. Volkan GÜNGÖREN (Direktur Jenderal untuk European Union dan Relasi Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Kehutanan).

Disampaikan dalam pertemuan, bahwa turki sangat mengapresiasi Kepemimpinan Indonesia pada G20. Hubungan kerjasama Indonesia-Turki terjalin dengan erat dan akan terus ditingkatkan. Indonesia merupakan negara yang besar dan berperan penting di kawasannya. Delegasi Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa di Indonesia sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang berdampak positif 16,24% terhadap PDB dan mampu bertahan dalam pandemik. Lebih lanjut lagi, tujuan dari kunjungan diplomasi ini adalah untuk mempelajari pertanian cerdas guna mengatasi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global. Kedua belah pihak berharap untuk dapat berdiskusi dalam pengembangan sektor pertanian indonesia lebih maju utamanya dalam design dan formula serta implementasi kebijakan dan teknologi agar lebih modern lagi. Terdapat beberapa hal yang menjadi potensi kerjasama Indonesia-Turki, diantaranya:

- 1) Adaptasi dan edukasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor pertanian.
- 2) Pentingnya modernisasi pertanian karena indonesia sangat tergantung pada cuaca, seperti teknologi untuk irigasi. Serta teknologi drone dalam hal pengawasan untuk kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.

- 3) Peluang kerjasama kelapa sawit dan minyak sawit dari Indonesia ke Turki.
- 4) Peluang kerja sama terkait pupuk dari Indonesia ke Turki.
- 5) Potensi kerjasama sektor kelautan perikanan, mengingat Indonesia memiliki luasan laut yang besar, dan Turki memiliki teknologi yang lebih maju. Turki memiliki ketertarikan untuk bekerjasama lebih lanjut dalam pengembangan budi daya berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- 6) Teknologi pengendalian kebakaran hutan untuk dapat diadopsi Indonesia.

Dalam hal penanganan kebakaran hutan dan tata kelola kehutanan, disampaikan bahwa 95 hutan di Turki merupakan hutan negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pada saat kebakaran hutan terjadi, area terdampak seluas 27.707 Ha. Poin penting terkait upaya mengatasi kebakaran hutan, adalah adanya dukungan kepada masyarakat sekitar hutan untuk pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat, serta mitigasi kebakaran hutan.

Lebih lanjut lagi disampaikan bahwa Turki merupakan Negara yang unggul untuk penangkapan dan budi daya ikan. Dengan jenis ikan yang menjadi andalan adalah ikan hamsi dengan 20% penangkapan ikan di laut. Adapun produk budi daya ikan yang utama adalah seabass dan seabream dan rainbow fish, serta Jenis penangkapan ikan di laut untuk Turki adalah tertinggi di Eropa, dan kelima di dunia. Sebagai gambaran, di Turki terdapat 15 ribu kapal penangkapan ikan yang bisa menangkap ikan di laut-laut besar atau samudera, pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal kerja sama, disampaikan bahwa pada tahun 2021 sudah menyampaikan draft kerja sama untuk pengambilan ikan di laut dan perlu dukungan untuk kegiatan tersebut. Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam hal budi daya perikanan dan terkait SDM perikanan. Secara khusus pihak Turki menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk memberikan informasi budidaya tersebut dan siap bekerja sama lebih lanjut

Kemudian dalam mengatasi ancaman krisis pangan global di Turki, 50 institusi R & D bekerja sama dengan institusi dunia. Keamanan pangan menjadi topik penting dalam Kementerian Pertanian sehingga dibentuk departemen khusus. Perencanaan dan Aksi untuk keamanan pangan adalah 5-17% untuk riset dan pengembangan. Kemudian untuk memperkuat ketahanan pangan, pertanian keluarga telah digalakkan di Turki. Standar produk pertanian Turki telah diharmonisasi dan mengadopsi standar EU, bahkan standar Turki lebih tinggi.

Produk pertanian dari Indonesia antara lain *Crude Palm Oil* (CPO) sangat dibutuhkan di Turki begitu pula pati jagung. Masyarakat Turki belum mengenal buah-buahan tropis dan perlu implementasi best practices untuk memperpanjang umur simpan buah tersebut hingga bisa

diperkenalkan dan diperdagangkan di Turki. Selain itu, Turki tidak bisa memproduksi kopi, namun karena budaya minum kopi sangat melekat dan berkembang pesat terutama di kalangan pemuda, sehingga perdagangan kopi menjadi peluang yang sangat potensial. Kemudian disampaikan pula oleh Ahmet bahwa Turki menawarkan komoditas daging sapi, telur, dan susu untuk dapat diperdagangkan di Indonesia.

Set. Komisi IV DPR RI